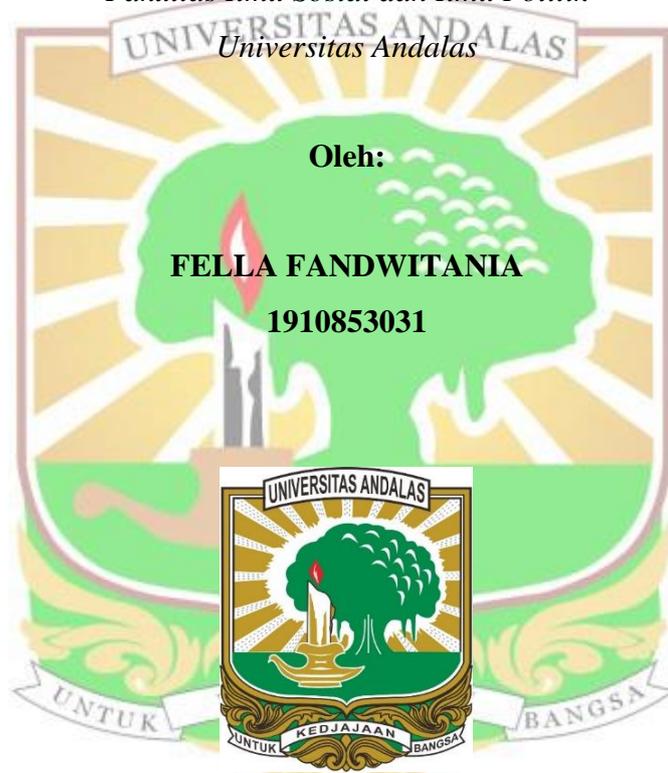


**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BERKEMBANGNYA
AKTIVITAS PARADIPLOMASI KOTA PADANG DAN
KOTA HILDESHEIM PADA TAHUN 1988-2022**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



Pembimbing I: Dr. Muhammad Yusra, S.IP, M.A

Pembimbing II: Poppy Irawan, S.IP, MA.IR

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Nama : Fella Fandwitania
NIM : 1910853031
Departemen : Hubungan Internasional (S1)
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas
Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun
1988-2022

Pembimbing I

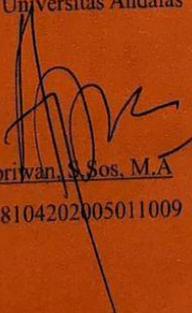

Dr. Muhammad Yusra, S.IP, M.A
NIP 198512112009121003

Pembimbing II


Poppy Irawan, S.IP, MA,IR
NIP 198404202008121004

Mengetahui,

Ketua Departemen Hubungan Internasional
FISIP – Universitas Andalas


Dr. Apriwan, S.Sos, M.A
NIP 198104202005011009

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

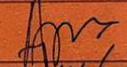
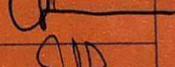
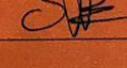
Skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022** atas nama **Fella Fandwitania** ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada:

Hari/Tanggal : Rabu/30 Agustus 2023

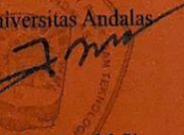
Jam : 10.00-11.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Departemen Hubungan Internasional

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Apriwan, S.Sos, M.A NIP 198104202005011009	Ketua	
2.	Silvi Cory, M.Si NIP 198604212019032012	Sekretaris	
3.	Maryam Jamilah, S.IP, M.Si NIP 199203072020122003	Anggota	
4.	Dr. Muhammad Yusra, S.IP, M.A NIP 198512112009121003	Pembimbing I	
5.	Poppy Irawan, S.IP, MA. IR NIP 198404202008121004	Pembimbing II	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas


Dr. Azwar, M.Si

NIP 196712261993031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian, dan perumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 13 September 2023

Yang membuat pernyataan



Fella Fandwitania

NIM 1910853031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fella Fandwitania

NO. BP/NIM/NIDN : 1910853031

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi dari tugas akhir Saya yang berjudul:

**“Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota
Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya Saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 13 September 2023

Yang membuat pernyataan



Fella Fandwitania

NIM 1910853031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis utarakan kepada Allah SWT atas semua kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul; ***“Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022”***. Pada momen ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menolong, memberikan semangat, serta memanjatkan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rosfian, S.E dan Ibu Hutri Achnita, A.Md. Terima kasih untuk segala pengorbanan, cinta kasih dan doa yang tak pernah putus yang telah mama dan papa berikan kepada penulis. Sungguh tanpa dukungan, semangat dan motivasi dari mama dan papa, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adek penulis. Untuk kakak penulis, Finny Fujriyannisa, S.P, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang selalu Kak Finny berikan kepada penulis selama ini. Terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini. Untuk adek penulis, Fadhil Fajri, terima kasih atas waktu dan bantuan yang selalu Fadhil berikan kepada penulis selama ini.
3. Keluarga besar penulis. Terima kasih kepada kakek, nenek, om, tante dan sepupu-sepupu penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak Dr. Muhammad Yusra, S.IP, MA dan Bapak Poppy Irawan, S.IP. MA.IR selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan masukan, saran, dan dukungan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan berpikir kritis sehingga penulis dapat menulis dengan baik. Sungguh skripsi ini tidak akan selesai tanpa campur tangan dan masukan-masukan hebat yang Bapak berikan, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.
5. Bapak Dr. Apriwan, S.Sos, MA, Ibu Silvi Cory, M.Si, dan Ibu Maryam Jamilah, S.IP, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pencerahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik dan benar. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis utarakan.
6. Kucing-kucing kesayangan penulis, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada; Muezza, Miuw, Lolly, Joey, Noty, Tina, Owy, Adek, dan Ntan yang telah berperan besar dalam menghibur dan menjadi *moodbooster* penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, serta selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah setia menjadi sahabat 24/7 penulis.
7. Novya Helmanda, A.Md.M. Sahabat terbaik penulis dari masa SMA hingga saat ini. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam melewati proses-proses berat saat pengerjaan skripsi ini. Terima kasih selalu memberi semangat dan meyakini penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

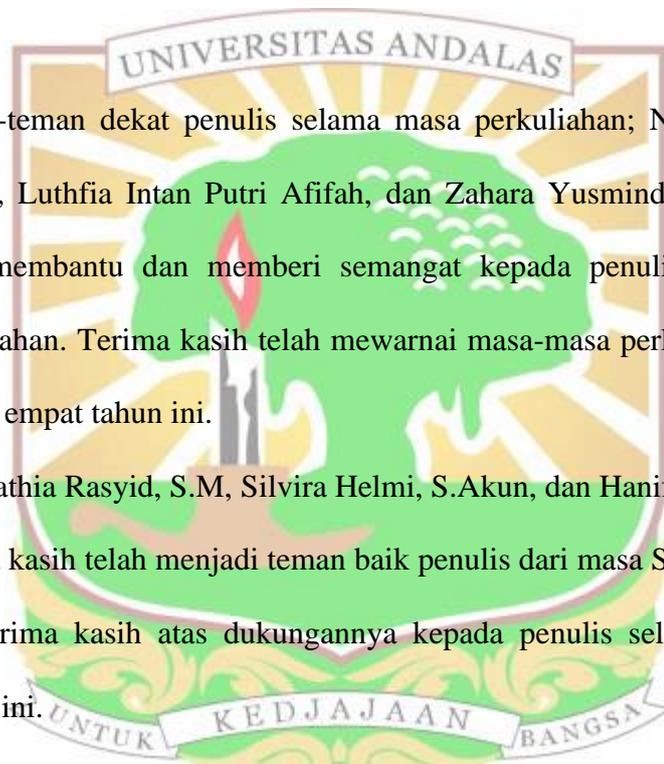
8. Annisa Nafrianti dan Putri Adinda Chantika. Sahabat-sahabat terbaik penulis di bangku perkuliahan. Terima kasih telah membantu penulis untuk melewati kehidupan perkuliahan selama empat tahun dan selalu sabar serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis selama empat tahun ini. Semoga kedua sahabat terbaik penulis ini dapat menyelesaikan skripsi secepatnya dan diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan gelar S.IP.

9. Teman-teman dekat penulis selama masa perkuliahan; Nabila Ramdhita Ivonne, Luthfia Intan Putri Afifah, dan Zahara Yusminda. Terima kasih telah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis selama empat tahun ini.

10. Ratu Fathia Rasyid, S.M, Silvira Helmi, S.Akun, dan Hanif Sufran, S.Tr.T. Terima kasih telah menjadi teman baik penulis dari masa SMA hingga saat ini. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

11. Vebyan Syafitra, S.IP. Terima kasih penulis ucapkan kepada senior penulis ini yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2019. Terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis selama empat tahun ini.



13. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam pengumpulan data primer untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bantuan kepada penulis dalam mendapatkan data-data tersebut.
14. Orang-orang baik lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih telah menjadi orang baik di kehidupan penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir dan utama sekali, terima kasih kepada diri penulis sendiri karena selalu berusaha dan kuat selama dua puluh dua tahun ini.



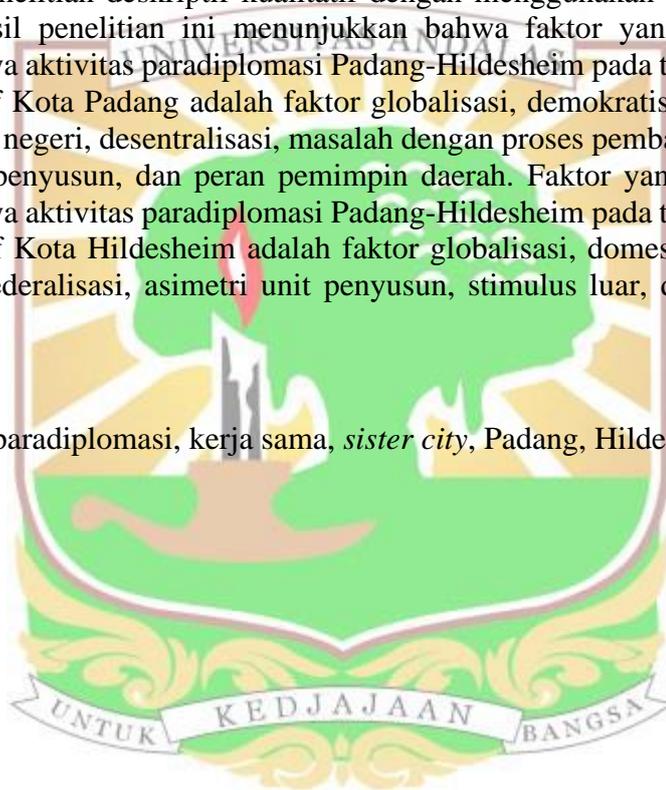
Padang, 13 September 2023
Penulis,

Fella Fandwitania

ABSTRAK

Pada tahun 1988, Pemerintah daerah Indonesia dan Pemerintah federasi Jerman membentuk aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Kerja sama *sister city* ini memiliki pola yang menarik karena dibentuknya kerja sama ini tidak sejalan dengan ketentuan dibentuknya kerja sama *sister city* yaitu atas dasar kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah. Walaupun demikian, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini dapat berkembang selama 34 tahun dan masih aktif hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dengan menggunakan konsep paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Padang adalah faktor globalisasi, demokratisasi, domestikasi kebijakan luar negeri, desentralisasi, masalah dengan proses pembangunan bangsa, asimetri unit penyusun, dan peran pemimpin daerah. Faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Hildesheim adalah faktor globalisasi, domestikasi kebijakan luar negeri, federalisasi, asimetri unit penyusun, stimulus luar, dan peran partai politik.

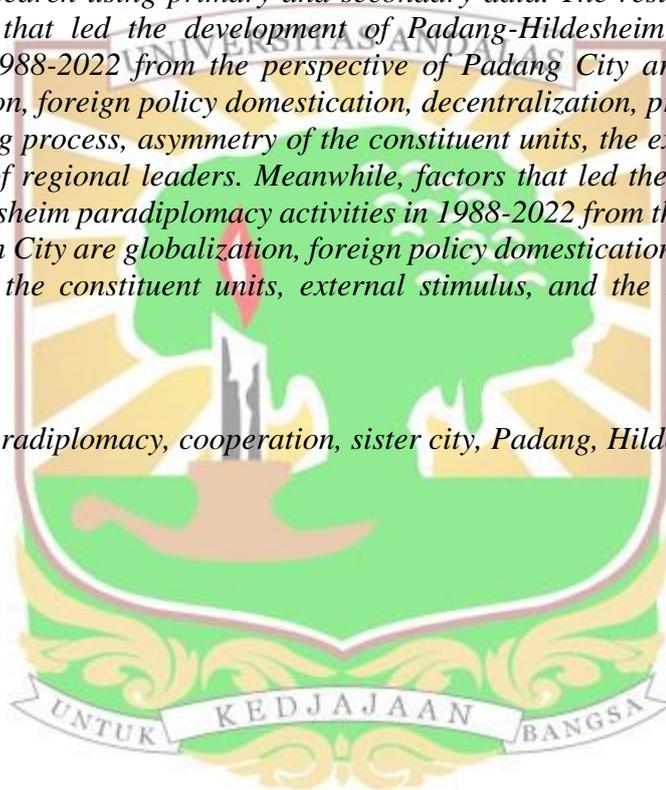
Kata kunci : paradiplomasi, kerja sama, *sister city*, Padang, Hildesheim.



ABSTRACT

In 1988, the local government of Indonesia and the Government of German federation established paradiplomacy activities in the form of Padang-Hildesheim sister city cooperation. This sister city cooperation has an interesting pattern because the formation of this cooperation not accordance with the provisions for the formation of sister city cooperation, specifically on the basis of similar characteristics and superior regional potential. However, Padang-Hildesheim sister city cooperation has been able to develop for 34 years and it remains active today. The purpose of this study is to identify the causative factors of paradiplomacy development in Padang City and Hildesheim City in 1988 using the concept of paradiplomacy by Alexander S. Kuznetsov. This research is a qualitative descriptive research using primary and secondary data. The results of this study show factors that led the development of Padang-Hildesheim paradiplomacy activities in 1988-2022 from the perspective of Padang City are globalization, democratization, foreign policy domestication, decentralization, problems with the nation-building process, asymmetry of the constituent units, the external stimulus, and the role of regional leaders. Meanwhile, factors that led the development of Padang-Hildesheim paradiplomacy activities in 1988-2022 from the perspective of the Hildesheim City are globalization, foreign policy domestication, federalization, asymmetry of the constituent units, external stimulus, and the role of political parties.

Keywords : *paradiplomacy, cooperation, sister city, Padang, Hildesheim.*



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Kerangka Pemikiran	14
1.7.1 Paradiplomasi	14
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Batasan Penelitian	20
1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis	20
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	21
1.8.5 Teknik Analisis Data	23
1.9 Sistematika Penulisan	24
BAB II	26

PARADIPLOMASI DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN	26
2.1 Paradiplomasi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia	26
2.1.1 Hukum yang Menjadi Landasan Paradiplomasi di Indonesia.....	31
2.2 Paradiplomasi Dalam Kebijakan Luar Negeri Jerman	35
2.2.1 Hukum yang Menjadi Landasan Paradiplomasi di Jerman.....	39
BAB III	41
PERKEMBANGAN PARADIPLOMASI KOTA PADANG DAN.....	41
KOTA HILDESHEIM	41
3.1 Sejarah Terbentuknya Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim.....	42
3.2 Perluasan Ruang Lingkup Fokus Kerja Sama dalam Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim	47
3.3 Program-program dan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Dalam Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Hingga Tahun 2022.....	49
BAB IV	64
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BERKEMBANGNYA AKTIVITAS PARADIPLOMASI KOTA PADANG DAN KOTA HILDESHEIM PADA TAHUN 1988-2022	64
4.1 Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Padang	65
4.2 Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Hildesheim.....	80
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93

5.2 Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Status April 2018 OECD/DAC 38



DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BMBFF	: Bundesministerium für Bildung und Forschung
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CRPD	: Convention on the Rights of Person with Disabilities
DAAD	: Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EFI	: Engineering for Indonesia
FTSP	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GOR	: Gelanggang Olah Raga
HAWK	: Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
IfA	: Institut für Auslandsbeziehungen
ITP	: Institut Teknologi Padang
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
LoI	: Letter of Intent
MoM	: Minutes of Meeting
MoU	: Memorandum of Understanding
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UBH	: Universitas Bung Hatta
UE	: Uni Eropa
UNES	: Universitas Eka Sakti
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UPI	: Universitas Pendidikan Indonesia
ZAH	: Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena globalisasi menjadikan semakin meningkatnya aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional. Duchacek dalam tulisannya *The International Dimension of Subnational Self Government* mengasumsikan bahwa dalam paradiplomasi, pemerintah subnasional memiliki hak yang sama dengan pemerintah nasional dalam melakukan kegiatan luar negeri seperti menandatangani perjanjian internasional, mengembangkan perwakilan di luar negeri, melakukan misi perdagangan internasional, dan melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain.¹ Paradiplomasi menjadikan pemerintah nasional mendorong pemerintah subnasionalnya untuk terlibat aktif dalam kerja sama internasional dan mengambil peran dalam mencapai kepentingan nasional negara.² Salah satu bentuk aktivitas paradiplomasi adalah kerja sama *sister city*.³

Berdasarkan data dari *Sister Cities International*, pada tahun 2021 negara dengan kerja sama *sister city* terbanyak di dunia adalah Jerman, yaitu dengan lebih dari 7.000 kerja sama *sister city* yang telah dijalin. Jerman memulai aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* pertama kali pada tahun 1947 antara Kota Crailsheim, Jerman dengan Kota Worthington, AS.⁴ Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman pada tahun 1962 hingga 1988 memperjelas

¹ Duchacek, "The International Dimension of Subnational Self Government," *Publius* 14 (4), 1984.

² Duchacek, "The International Dimension of Subnational Self Government."

³ Benjamin Leffel dan Sohaela Amiri, "Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy," *Rising Power Quarterly* 3 (1), 2018.

⁴ The Millennia-Long History of German Sister Cities, diakses 8 Mei 2023, <https://sistercities.org/2019/10/11/history-of-german-sister-cities/>

bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.⁵ Hal tersebut menjadikan negara bagian Jerman banyak melakukan aktivitas paradiplomasi dengan negara-negara berkembang.

Salah satu negara berkembang yang menjadi mitra paradiplomasi Jerman adalah Indonesia. Paradiplomasi pertama Jerman dengan Indonesia adalah kerja sama *sister city* antara Kota Braunschweig dengan Kota Bandung pada tahun 1960.⁶ Kerja sama ini dilatar belakangi oleh kesamaan karakteristik dalam potensi unggulan daerah dimana Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.⁷ Bandung juga merupakan kota tujuan dalam pendidikan di Indonesia.⁸ Sama halnya dengan Kota Bandung, Kota Braunschweig juga merupakan salah satu kota terbesar dan perekonomian maju di Niedersachsen, Jerman dan merupakan kota pusat penelitian dan pengembangan ilmiah.⁹ Adanya kesamaan karakteristik dalam potensi unggulan daerah antara kedua kota tersebut menjadikan kedua kota ini memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan keunggulan daerahnya. Kerja sama *sister city* Bandung-Braunschweig ini berfokus pada perekonomian dan

⁵ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

⁶ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), 107.

⁷ Mufidah Fahri, "Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City," *Digilib Unhas*, 2018.

⁸ Mufidah Fahri, "Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City."

⁹ Mufidah Fahri, "Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City."

sosial budaya yang meliputi pendidikan dan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan lainnya.¹⁰

Selanjutnya, paradiplomasi Jerman dengan Indonesia lainnya yaitu kerja sama *sister city* yang dijalin oleh Kota Hildesheim dengan Kota Padang. Kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini diresmikan pada tahun 1988.¹¹ Lain halnya dengan kerja sama *sister city* Bandung-Braunschweig, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dilatar belakangi atas banyak perbedaan karakteristik, baik dari kondisi geografis, perekonomian maupun potensi unggulan daerah. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 694.96 km² pada tahun 2021.¹² Sumber utama perekonomian masyarakat Kota Padang yaitu dari sektor perdagangan.¹³ Potensi unggulan Kota Padang yaitu kekayaan alam yang melimpah.¹⁴ Bertolak belakang dengan Kota Padang, Kota Hildesheim merupakan kota di Jerman Utara yang memiliki luas wilayah hanya sebesar 92.96 km².¹⁵ Sumber utama perekonomian masyarakat Kota Hildesheim yaitu dari sektor industri.¹⁶ Disamping banyaknya perbedaan latar belakang antara kedua kota tersebut, masih terdapat persamaan antar kedua kota ini dimana kedua kota ini memiliki potensi unggulan dalam sektor pariwisata.¹⁷ Kota Hildesheim

¹⁰ Gilang Nur Alam dan Arfin Sudirman, "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama *Sister City*," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16 (1), 2020.

¹¹ Rika Isnarti dan Sofia Trisni, "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy," *AEGIS: Journal of International Relations* 4 (2), 2020.

¹² Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Luas Daerah (km²), 2018 – 2021*, terakhir dimodifikasi 2021, diakses 2 April 2023, <https://padangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-daerah.html>.

¹³ Yulcherlina, et al, *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*, (Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018), 17.

¹⁴ Putri Titian, "Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) Pemerintah Kota Padang Dengan Pemerintah Kota Hildesheim Pada Tahun 2012-2018," *UMY Repository*, 2019.

¹⁵ Yulcherlina, et al, *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*, (Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018), 22.

¹⁶ Yulcherlina, et al, 32-33.

¹⁷ Yulcherlina, et al, 10, 27.

merupakan salah satu kota warisan budaya yang diakui UNESCO dengan wisata bangunan bersejarahnya.¹⁸ Sama halnya dengan Kota Hildesheim, objek wisata yang paling menarik di Kota Padang adalah wisata bersejarah.¹⁹

Banyaknya perbedaan latar belakang dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini tentunya akan menimbulkan ketimpangan kepentingan. Hal tersebut karena menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, kolaborasi antar negara dalam kerja sama ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi atau keunggulan yang sama yang dimiliki masing-masing negara, bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu negara dan diharapkan bisa diperoleh melalui bantuan negara lain.²⁰ Ketika kerja sama *sister city* memiliki latar belakang keunggulan yang sama maka dalam kerja sama tersebut akan terwujud *sensitive interdependence* sehingga kedua negara yang terlibat dalam kerja sama *sister city* tersebut tidak saling bergantung.²¹ Selain itu, kesuksesan kerja sama *sister city* juga dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik wilayah yang meliputi kesamaan sejarah, kesamaan tingkat ekonomi, kemiripan nama, keterkaitan yang telah dijalin sebelumnya, dan kemiripan permintaan dalam suatu kota dengan tujuan agar dapat membangun kepentingan bersama yang saling menguntungkan.²² Walaupun demikian, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dapat berkembang selama 34 tahun dan aktif hingga saat ini. Berkembangnya kerja sama ini dapat dilihat dari berlangsungnya kerja sama dari tahun 1988 hingga tahun

¹⁸ Yulcherlina, et al, 19.

¹⁹ Rika Isnarti dan Sofia Trisni, "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy," *AEGIS: Journal of International Relations* 4 (2), 2020.

²⁰ Haldzi Faturrohman Ibrahim, "Kerjasama Paradiplomasi Kota Bandung – Braunschweig di Dalam Bidang Pendidikan dan Kepemudaan," *Repository Unpas*, 2019.

²¹ Haldzi Faturrohman Ibrahim, "Kerjasama Paradiplomasi Kota Bandung – Braunschweig di Dalam Bidang Pendidikan dan Kepemudaan."

²² Gina Puspitasari Rochman, "Pengelolaan Kota Melalui Jejaring *Sister City*: Kasus Studi Dari Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7 (2), 2019.

2006 dan sempat berhenti selama 6 tahun, kemudian kerja sama ini dilanjutkan kembali pada tahun 2012 hingga saat ini.²³ Selain itu, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dapat dikatakan berkembang juga dibuktikan dari perluasan ruang lingkup kerja sama yang pada *Administrative Agreement* 1988, kerja sama ini hanya berfokus pada pertukaran mahasiswa dan pelatihan staf, pertukaran informasi, pertukaran budaya, dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan pada MoU 2018, ruang lingkup kerja sama ini telah bertambah pada beberapa bidang, meliputi *industry traineeship*, revitalisasi bangunan bersejarah, pengembangan perencanaan kota, manajemen pengurangan resiko bencana, penanganan limbah dan manajemen lingkungan, dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau tuna netra. Selanjutnya, kerja sama ini berhasil memberikan banyak dampak positif bagi Kota Padang. Dengan adanya paradiplomasi Padang-Hildesheim, pertumbuhan ekonomi Kota Padang dapat meningkat hingga 6% pada tahun 2009-2015, atau sedikit diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.²⁴

Dengan demikian, paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini menarik untuk diteliti karena walaupun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tidak dilatar belakangi atas kesamaan potensi unggulan daerah tetapi kerja sama ini masih dapat aktif dan berkembang selama 34 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 1988, Kota Padang dan Kota Hildesheim melakukan aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*. Kerja sama ini memiliki pola yang menarik karena pembentukan kerja sama ini tidak sejalan dengan ketentuan

²³ Bobby Hermenda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

²⁴ Yulcherlina, et al, 72.

dibentuknya kerja sama *sister city* yaitu atas dasar kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perbedaan karakteristik dan potensi unggulan daerah antara Kota Padang dan Kota Hildesheim. Kondisi tersebut dinilai akan menimbulkan ketimpangan kepentingan dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim. Walaupun terlihat akan menimbulkan banyak ketimpangan kepentingan, tetapi paradiplomasi Padang-Hildesheim ini dapat berkembang selama 34 tahun yaitu dari awal pembentukan tahun 1988 hingga tahun 2022, paradiplomasi ini masih aktif hingga sekarang. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apa saja faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat sehingga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan lainnya untuk memahami konsep paradiplomasi dalam kerjasama internasional melalui adanya kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di tingkat daerah terkait implementasi paradiplomasi ditinjau berdasarkan kajian hubungan internasional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa referensi dan sumber lain yang membahas mengenai topik yang penulis angkat, yaitu paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*. Sumber-sumber tersebut digunakan oleh penulis sehingga dapat memberikan tinjauan terhadap analisis.

Penelitian pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Rika Isnarti dan Sofia Trisni yang berjudul *The City of Padang Challenges for Paradiplomacy* yang terbit pada tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan mengenai paradiplomasi yang telah dilakukan Kota Padang yang diawali dengan kerja sama *sister city* Kota Padang dengan Kota Hildesheim Jerman pada tahun 1988 dan dilanjutkan dengan kerjasama dengan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan Fremantle, Australia. Namun dalam menjalankan paradiplomasinya, Padang dinilai sangat lambat karena terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Padang seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengurus kerja sama luar negeri, kurangnya kerja sama dengan pihak lokal dalam menjalankan kerja sama luar negeri, dan lainnya. Kota Padang juga dinilai menutup diri dari dunia global karena beberapa permasalahan seperti birokrasi, pola pikir dan kemauan politik. Walaupun minimnya implementasi paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, tetapi hingga saat ini Pemerintah Kota Padang masih berusaha dalam

memaksimalkan paradiplomasi dan mengimplementasikan program-program dalam kerja sama luar negeri.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitian yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tantangan dan hambatan dalam paradiplomasi di Kota Padang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* yang dijalin oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim.

Penelitian kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Nurul Alfath Syarif yang berjudul Hambatan Kerja sama *Sister City* Kota Padang Indonesia dan Kota Fremantle Australia yang terbit pada tahun 2019. Tulisan ini menjelaskan bahwa kerja sama internasional merupakan kerja sama yang dibentuk antar negara dengan tujuan untuk saling membantu dan mewujudkan kepentingan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Dibentuknya kerja sama *sister city* Kota Padang dan Kota Fremantle adalah salah satu cara untuk memenuhi kepentingan Indonesia dan Australia. Kerja sama *sister city* Padang-Fremantle diawali dengan kerja sama *friendship city* yang dibangun pada tahun 1996. Kerja sama ini dilandaskan atas kemiripan kedua kota yang sama-sama memiliki pelabuhan yang strategis dan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota nya. Selain itu, Kota Padang dan Kota Fremantle juga memiliki persamaan sebagai kota yang unggul dalam sektor pariwisata. Namun Kota Fremantle jauh lebih unggul dalam bidang kemajuan pelabuhan dan tatanan kota nya dibandingkan Kota Padang. Kerja

²⁵ Rika Isnarti dan Sofia Trisni, "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy," *AEGIS: Journal of International Relations* 4 (2), 2020.

sama *sister city* Padang-Fremantle ini dilandaskan atas prinsip saling menguntungkan kedua pihak. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme penyusunan dan penandatanganan kerja sama *sister city* Padang-Fremantle sehingga menghasilkan ikatan kerja sama secara hukum dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI).

Kerja sama *sister city* Padang-Fremantle memiliki empat fokus bidang kerja sama, yaitu perdagangan dan jasa, peningkatan kapasitas SDM, pariwisata dan kebudayaan, dan perencanaan dan infrastruktur. Namun setelah berlangsung selama 2 tahun, kerja sama ini dinilai belum efektif karena masih belum adanya rencana aksi sehingga kerja sama ini tidak menghasilkan *output*. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hambatan seperti lambatnya respon Pemerintah Fremantle dalam menindaklanjuti kerja sama ini, Pemerintah Kota Padang yang masih belum memprioritaskan kerja sama ini, adanya keterbatasan anggaran daerah untuk menindaklanjuti kerja sama ini, kurangnya dukungan pemerintah pusat dalam kerja sama ini, dan *political will* yang disusun oleh pemerintah daerah dinilai kurang sejalan dengan tujuan kerja sama *sister city* Padang-Fremantle ini.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah studi kasus yang digunakan dan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kasus kerjasama *sister city* Padang-Fremantle dalam melihat hambatan kerja sama dan menggunakan teori kerjasama internasional, sedangkan penelitian penulis berfokus paradiplomasi Padang-Hildesheim dengan menggunakan teori paradiplomasi

²⁶ Nurul Alfath Syarif, "Hambatan Kerjasama Sister City Kota Padang Indonesia dan Kota Fremantle Australia," *JOM FISIP* 6 (II), 2019.

dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim tersebut pada tahun 1988-2022.

Penelitian ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Bobby Hermenda yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim yang terbit pada tahun 2016. Tulisan ini menjelaskan bahwa pada awalnya kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim berfokus pada bidang teknik, pendidikan, dan budaya. Setelah berhenti selama 6 tahun dan dilanjutkan kembali pada tahun 2012, kerja sama ini memperluas fokus kerja samanya pada bidang pengelolaan lingkungan, pertukaran informasi, tata ruang kota, dan pemberian pelatihan di Hildesheim. Dari hasil wawancara penulis dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang masih belum menjadikan kerja sama ini prioritas karena banyak agenda lain yang harus diprioritaskan Pemerintah Kota Padang. Namun lain halnya dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Hildesheim malah fokus dalam menjalankan kerja sama ini, yang mana dapat dilihat dari aksi seperti pemberian beasiswa kepada pelajar dari Kota Padang, membantu dalam rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi pada tahun 2009 di Kota Padang, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin bekerja di Kota Hildesheim. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga Pemerintah Kota Hildesheim masih serius dalam menjalankan kerja sama ini. Dalam skripsi ini faktor-faktor yang dijelaskan oleh penulis yaitu:

1. Hildesheim menganggap Kota Padang sebagai *partner* kerja sama yang menarik karena Padang memiliki budaya yang sangat indah seperti Rumah Gadang Minangkabau. Bentuk arsitektur rumah gadang ini merupakan daya tarik tersendiri

bagi Pemerintah Kota Hildesheim sehingga kerja sama ini juga fokus dalam bidang teknik yang meliputi teknik sipil dan arsitektur.

2. Pemerintah Hildesheim menganggap bahwa pertukaran informasi bersifat sangat penting. Hal ini dilandasi atas banyaknya pelajar dari Kota Padang yang menuntut ilmu di universitas di Hildesheim sehingga Pemerintah Kota Hildesheim ingin mengetahui pengaplikasian ilmu dan perkembangan para pelajar tersebut ketika telah kembali ke negaranya.

3. Pemerintah dan masyarakat Kota Padang dinilai sejalan dengan politik luar negeri Jerman dalam meningkatkan *people to people connection*.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitian dan teori yang digunakan, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor pendorong Jerman melanjutkan kembali kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dengan menggunakan teori kerja sama internasional dan konsep *sister city*, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun dengan menggunakan teori paradiplomasi.

Penelitian keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Rika Isnarti dan Poppy Irawan yang berjudul *West Sumatera Province's Readiness to Initiate Foreign Affairs* yang terbit pada tahun 2022. Tulisan ini menjelaskan mengenai pentingnya paradiplomasi atau hubungan luar negeri yang dijalin pemerintah daerah antar negara. Dengan adanya hubungan luar negeri maka pemerintah daerah dapat mewujudkan kepentingan daerahnya dengan bantuan pemerintah pusat tanpa

²⁷ Bobby Hermenda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

bertentangan dengan kepentingan nasional negara. Dalam artikel jurnal ini juga dibahas mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalin hubungan luar negeri. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai masih belum aktif dalam menjalin hubungan luar negeri secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari hanya terdapat dua penandatanganan perjanjian kerja sama Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi di negara lain dan belum adanya *action plan* dalam kerja sama tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat lebih sering menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dimana Sumatera Barat berperan sebagai representasi Indonesia. Disamping itu, Sumatera Barat juga sering melakukan peninjauan kerja sama dengan negara lain tetapi peninjauan kerja sama tersebut tidak menghasilkan kesepakatan kerja sama dalam bentuk hukum dan *action plan*. Masih minimnya tindakan yang diambil Pemprov Sumatera Barat dalam menjalin hubungan luar negeri juga disebabkan oleh berbagai tantangan dan hambatan seperti SDM, pemahaman mengenai teori dan teknis pelaksanaan kerja sama luar negeri, dan *action plan*.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitian. Penelitian ini membahas mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalin hubungan luar negeri dan hambatan serta tantangan yang dihadapi Pemprov Sumbar dalam menjalin kerjasama luar negeri, sedangkan penelitian penulis berfokus pada paradiplomasi di Kota Padang dengan studi kasus kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

²⁸ Rika Isnarti dan Poppy Irawan, "West Sumatera Province's Readiness to Initiate Foreign Affairs," *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science* 7 (2), 2022.

Penelitian kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Hendrik Sompotan yang berjudul Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia yang terbit pada tahun 2016. Tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia mulai melakukan kerja sama *sister city* pada tahun 1960 yang berdasarkan hukum perjanjian internasional. Di Indonesia, perjanjian kerjasama *sister city* memuat pelaksanaan teknis kerja sama yang tidak memerlukan pengesahan oleh presiden. Hingga saat sekarang ini, masih belum ada implikasi hukum kerja sama *sister city* yang diatur secara jelas dan tegas di Indonesia. Namun walaupun demikian, pemerintah pusat Indonesia memberikan wewenang untuk pemerintah daerah dalam menjalin hubungan luar negeri seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 5 Ayat 1 yang mengisyaratkan pemerintah daerah memiliki wewenang yang sama dengan pemerintah pusat dalam membentuk perjanjian internasional. Namun pemerintah pusat memiliki hak untuk membatalkan perjanjian internasional yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah dengan ketentuan apabila bertentangan dan mengancam kepentingan nasional.²⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penulisan. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum perjanjian internasional dalam kerja sama *sister city* di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*.

²⁹ Hendrik Sompotan, "Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 3 (3), 2016.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah peneliti paparkan sebelumnya, penulis menemukan bahwa dalam menjelaskan aktivitas paradiplomasi atau kerja sama *sister city* masih sedikit literatur yang menggunakan teori paradiplomasi dalam menjelaskan aktivitas paradiplomasi.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Paradiplomasi

Diplomasi merupakan adegan penting untuk mencapai kepentingan negara dalam politik internasional. Secara garis besar, diplomasi menekankan pada 3 aspek yaitu sebagai proses mengklaim otoritas, sebagai relasional antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, dan sebagai politik karena melibatkan perwakilan dan tata kelola.³⁰ Aktor yang dapat memainkan peran diplomasi dalam kegiatan internasional tidak hanya bergantung pada negara tetapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah non pusat. Keterlibatan pemerintah non pusat untuk melakukan diplomasi di arena internasional disebut juga dengan paradiplomasi. Duchacek dan Soldatos mendefinisikan paradiplomasi sebagai keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional melalui pembentukan hubungan formal dan informal, bilateral ataupun multilateral dengan negara asing ataupun pihak swasta dengan tujuan untuk mempromosikan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan isu *low politic* lainnya.³¹ Paradiplomasi memberi pengaruh signifikan terhadap modalitas politik internasional. Hal tersebut karena paradiplomasi menimbulkan perluasan konsep dan batas-batas diplomasi.³² Aktivitas paradiplomasi yang

³⁰ Thomas Jackson, "Paradiplomacy and Political Geography: The Geopolitics of Substate Regional Diplomacy," WILEY, 2018.

³¹ Martel G, "Paradiplomacy and Protodiplomacy," WILEY, 2018.

³² Thomas Jackson, "Paradiplomacy and Political Geography: The Geopolitics of Substate Regional Diplomacy," WILEY, 2018.

dilakukan oleh pemerintah subnasional mempengaruhi kebijakan luar negeri nasional yang tentunya akan berdampak terhadap tatanan dunia.³³

Dengan semakin berkembangnya aktivitas paradiplomasi tidak menjadikan posisi negara bergeser sebagai aktor utama dalam analisis hubungan internasional karena dalam melakukan negosiasi dan menyusun perjanjian internasional, pemerintah non pusat masih harus melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri. Paradiplomasi memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari kasus AS dimana pemerintah pusat AS memutuskan untuk menarik AS dari *Paris Agreement*. Menanggapi keputusan tersebut, dua belas gubernur negara bagian AS mengambil langkah untuk membentuk aliansi iklim AS sebagai bentuk upaya pemerintah negara bagian untuk berkontribusi dalam mengatasi isu *low politic* yaitu perubahan iklim yang memberi pengaruh besar bagi kelangsungan hidup manusia.³⁴ Tindakan yang dilakukan oleh dua belas gubernur AS tersebut merupakan bentuk paradiplomasi di bidang lingkungan.

Kuznetsov dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy; Subnational Governments in International Affairs* menjelaskan bahwa secara garis besar, dalam menjelaskan penyebab berkembangnya suatu aktivitas paradiplomasi, dapat diidentifikasi berdasarkan 2 faktor, yaitu berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal.³⁵

³³ Andre Lecours, "Paradiplomacy: Reflection on the Foreign Policy and International Relations of Regions," *International Negotiation* 7, 2002.

³⁴ Mariano Alvarez, "The Rise of Paradiplomacy in International Relations," *E-International Relations*, 2020.

³⁵ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 102.

Faktor eksternal yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi adalah sebagai berikut.³⁶

1. Globalisasi. Globalisasi menjadikan semakin mudarnya batas-batas ekonomi dan budaya antar negara sehingga memberikan kesempatan bagi entitas subnasional untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka melalui lintas batas negara.
2. Regionalisasi. Regionalisasi mengelompokkan wilayah atas kesamaan faktor sejarah internal, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian dalam melakukan paradiplomasi, pemerintah subnasional dapat melakukan evaluasi dampak dari regionalisasi terlebih dahulu dan kemudian menjadikan pengelompokkan dalam regionalisasi sebagai landasan dalam melakukan paradiplomasi.
3. Demokratisasi. Paradiplomasi berkaitan erat dengan penguatan demokrasi. Adanya gelombang demokratisasi global memungkinkan banyak masyarakat di seluruh dunia untuk memulai transformasi politik dari system otoriter ke rezim bebas.
4. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri. Adanya ketidakjelasan antara batas-batas politik dalam negeri dan luar negeri mendorong pemerintah subnasional untuk melakukan paradiplomasi dengan tujuan menyelesaikan *low political issue*.

³⁶ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 102-104.

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi adalah sebagai berikut.³⁷

1. Federalisasi dan desentralisasi. Adanya pemberian otoritas terhadap pemerintah negara bagian (federalisasi) atau pemerintah daerah (desentralisasi) dari pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan di arena internasional menjadikan meningkatnya paradiplomasi di hubungan internasional.
2. Masalah dengan proses pembangunan bangsa. Paradiplomasi memberikan peluang yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional dengan bantuan pemerintah non pusat.
3. Kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri. Lemahnya pemerintah pusat dalam mengelola politik luar negeri secara efektif mendorong pemerintah non pusat untuk melakukan paradiplomasi. Pemerintah non pusat cenderung memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk beberapa kegiatan internasional.
4. Asimetri unit penyusun. Adanya kekuatan besar ekonomi dan potensi unggulan subnasional tidak selalu harus dibatasi oleh batas-batas negara sehingga pemerintah subnasional harus menyebarkan potensi yang besar tersebut ke arena internasional.

³⁷ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 105-108.

5. Stimulus luar. Adanya stimulus eksternal dapat memberikan peluang besar bagi daerah atau negara bagian dalam mencapai kepentingan yang lebih besar dari kepentingan nasional dengan melawati batas-batas nasional.
6. Peran pemimpin daerah atau partai politik. Kepribadian pemimpin daerah dan identitas ideologi partai politik tertentu dapat menentukan intensitas dan kepentingan yang akan dicapai dalam paradiplomasi.
7. Peran perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan menjadikan negara-negara memilih untuk melakukan paradiplomasi dengan tujuan saling mencapai kepentingan satu sama lain. Secara geografis, paradiplomasi dikelompokkan atas paradiplomasi lintas batas kawasan (hubungan antar negara yang berada dalam wilayah yang sama), paradiplomasi lintas wilayah (hubungan antar negara tetangga tetapi tidak berbatasan langsung), dan paradiplomasi global (hubungan antar negara yang sama sekali tidak berbatasan secara geografis).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep paradiplomasi karena dianggap tepat dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*. Hal tersebut karena *sister city* merupakan salah satu wujud dari aktivitas paradiplomasi.³⁸ Konsep paradiplomasi yang digunakan penulis adalah konsep paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov dimana penulis menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 menggunakan pemikiran Kuznetsov dalam bukunya yang

³⁸ Benjamin Leffel dan Sohaela Amiri, "Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy," *Rising Power Quarterly* 3 (1), 2018.

berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy; Subnational Governments in International Affairs* yang menjelaskan bahwa secara garis besar, penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi dapat diidentifikasi berdasarkan 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek atau fenomena secara luas dan mendalam sehingga memperoleh pemahaman baru.³⁹ Ditinjau berdasarkan sifat dan jenis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, John W. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif bergantung pada teks dan gambar, menjabarkan langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggambar desain yang beragam.⁴⁰ Pendekatan kualitatif yang digunakan kemudian akan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif ini membantu peneliti untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

³⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 67.

⁴⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), 232.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pokok mengenai masalah penelitian saja sehingga tidak terjadinya kebingungan dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan mencapai hasil penelitian secara maksimal. Oleh karena itu batasan waktu penelitian ini adalah tahun 1986 hingga tahun 2022. Pada tahun 1986, awal mula peninjauan paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dilakukan dan hingga tahun 2022 kerja sama tersebut masih berlanjut dan telah memperluas fokus-fokus kerja samanya.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

a) Unit analisis dan eksplanasi.

Unit analisis merupakan agregasi data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Unit analisis juga dapat didefinisikan sebagai satuan yang diteliti dan diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

Unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit eksplanasi adalah kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

b) Tingkat analisis

Tingkat analisis (*level of analysis*) mencakup tingkatan individu; kelompok; negara; kelompok negara/kawasan; dan sistem internasional. Dalam penelitian ini, unit analisa dan unit eksplanasi berada pada tingkat negara, yang mana penulis

dapat menganalisis bahwa terdapat indikator-indikator kepentingan yang berpengaruh dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi ini. Dalam penulisan ini level analisis yang dimaksud adalah negara Indonesia dan Jerman.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan informan penelitian. Sementara, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya.

a) Data primer

Hasan mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer mencakup catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip negara yang memuat mengenai pembentukan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Dalam mengolah data primer, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dalam wawancara. Triangulasi sumber merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber informan dengan tujuan untuk memperkuat validitas data.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 4 sumber informan, yaitu

⁴¹ Syafnidawaty, "Data Primer," *Universitas Raharja*, last modified 2020, accessed January 11, 2023, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

⁴² Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5 (2), 2020.

Pihak Sekretariat Daerah Kota Padang (Pemerintah Kota Padang), Pemerintah Kota Hildesheim, Pemerintah Federal Jerman, dan Pihak Universitas Bung Hatta yang ikut bertanggung jawab dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Di sini, peneliti memainkan peran sebagai pihak kedua dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data penelitian yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, dan biasanya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan data primer.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan skripsi.

Buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku laporan yang ditulis oleh Yulcherlina, et al yang berjudul 30 Tahun Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim. Selanjutnya jurnal yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Rika Isnarti dan Sofia Trisni yang berjudul *The City of Padang Challenges for Paradiplomacy*. Dan skripsi terdahulu yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Bobby Hermenda yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim.

⁴³ Syafnidawaty, "Data Sekunder," *Universitas Raharja*, terakhir dimodifikasi 2020, diakses 11 Januari, 2023, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka sehingga peneliti dapat melaporkan hasil penelitian dan mendapatkan kesimpulan. Analisis data membantu peneliti untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut.⁴⁴

1. Pengumpulan data

Dalam analisis data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang paradiplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan Jerman, sejarah dibentuknya paradiplomasi Padang-Hildesheim, ruang lingkup paradiplomasi Padang-Hildesheim, program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim hingga tahun 2022 yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 4 narasumber dan studi pustaka.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis hanya menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan masalah penelitian.

⁴⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Malang: ANDI, 2010), 199.

⁴⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 199.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap menyajikan sekumpulan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data-data yang berkaitan dengan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim sehingga mendapatkan hasil analisis tentang faktor-faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

4. Pengambilan kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kesimpulan akhir terkait faktor-faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 pada bab terakhir yaitu bab 5.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki kaitan satu dengan yang lain. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Paradiplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan kebijakan luar negeri Jerman

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai paradiplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, hukum yang menjadi landasan dalam paradiplomasi di Indonesia,

⁴⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 200.

paradiplomasi dalam kebijakan luar negeri Jerman, dan hukum yang menjadi landasan dalam paradiplomasi di Jerman.

Bab 3. Perkembangan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim

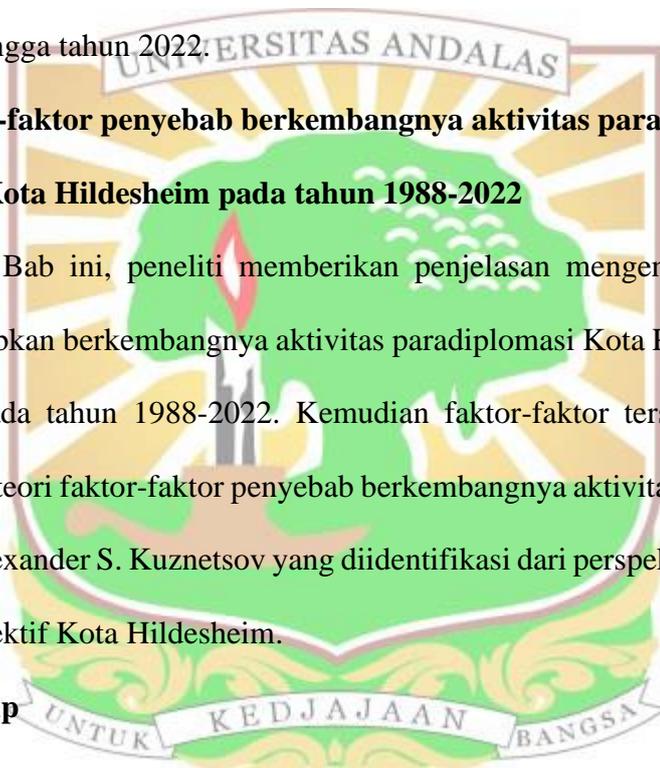
Bab ini terdiri dari sejarah terbentuknya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim, perkembangan ruang lingkup fokus kerja sama dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim, dan program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim hingga tahun 2022.

Bab 4. Faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022

Dalam Bab ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Kemudian faktor-faktor tersebut dijelaskan menggunakan teori faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi terjadi oleh Alexander S. Kuznetsov yang diidentifikasi dari perspektif Kota Padang dan dari perspektif Kota Hildesheim.

Bab 5. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil Pemerintah Kota Padang dalam membentuk paradiplomasi kedepannya.



BAB II

PARADIPLOMASI DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN

Indonesia merupakan negara di luar Eropa yang paling lama menjalin hubungan bilateral dengan Jerman yaitu dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.⁴⁷ Hal ini dapat dilihat dari ikut didirikannya Rumah Siemens di Kota Surabaya setelah 7 tahun Siemens didirikan di Jerman, tepatnya pada tahun 1854. Walaupun telah berlangsung sejak lama, namun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman ini baru diresmikan pada tahun 1952. Sejak diresmikannya hubungan diplomatik tersebut, Indonesia dan Jerman aktif menjalin kerja sama bilateral hingga saat ini. Tidak hanya kerja sama antara pemerintah pusat Indonesia dan pemerintah federal Jerman, pemerintah daerah Indonesia dan pemerintah federasi Jerman juga diberikan kewenangan oleh masing-masing pemerintah pusatnya untuk melakukan kerja sama atau yang disebut juga dengan paradiplomasi. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai paradiplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan Jerman.

2.1 Paradiplomasi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam kerja sama luar negeri. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162

⁴⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Republik Federal Jerman, "Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman," diakses 6 Juli, 2023, <https://www.kemlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu>

negara.⁴⁸ Berdasarkan data pada *Treaty Room* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dari tahun 1945 hingga tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengimplementasikan sebanyak 6.619 perjanjian internasional.⁴⁹ Banyaknya negara mitra kerja sama bilateral dan jumlah Indonesia terlibat dalam perjanjian internasional merupakan bentuk implementasi prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif.

Di Indonesia, yang dapat melakukan kerja sama luar negeri bukan hanya pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah Indonesia juga dapat melakukan kerja sama luar negeri. Terlibatnya pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri disebut juga dengan paradiplomasi. Bentuk aktivitas paradiplomasi di Indonesia sangat beragam. Salah satu aktivitas paradiplomasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah kerja sama *sister city*. Banyaknya kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia disebabkan oleh adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri secara luas dan aktif. Kewenangan pemerintah daerah Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.⁵⁰ Pemerintah daerah Indonesia mendapatkan wewenang untuk melakukan kerja sama luar negeri pada berbagai bidang, seperti penanaman modal asing, kegiatan ekspor impor, kerja sama pariwisata, pendidikan, budaya, dan bidang lainnya yang

⁴⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kerja Sama Bilateral," terakhir dimodifikasi 2023, diakses 29 Mei 2023, https://www.kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral

⁴⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Treaty Room," terakhir dimodifikasi 2023, diakses 29 Mei 2023, https://treaty.kemlu.go.id/aboutus/info/about_treaty_room

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

menyangkut pembangunan.⁵¹ Walaupun diberikan wewenang dengan bidang kerja sama luar negeri yang sangat luas, tetapi masih terdapat batasan bidang kerja sama luar negeri yang dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi persoalan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, moneter dan fiskal nasional, dan yustisi.⁵²

Menipisnya batas-batas antar negara bangsa di dunia internasional menjadikan tantangan persaingan ekonomi semakin ketat di hubungan internasional. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat Indonesia menetapkan bahwa kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia merupakan hal yang krusial dalam politik luar negeri Indonesia.⁵³ Dengan demikian pemerintah pusat Indonesia sangat mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan paradiplomasi. Pemerintah pusat Indonesia juga meyakini bahwa keberhasilan politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kondisi dalam negeri sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mencari peluang ekonomi melalui hubungan luar negeri seperti kerja sama *sister city* dengan kepentingan untuk memajukan perekonomian daerah dan tentunya mencapai pertumbuhan ekonomi nasional.⁵⁴ Selain itu, faktor yang menyebabkan pemerintah pusat Indonesia mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan hubungan luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional yaitu Indonesia dapat bersaing dan menjadi prioritas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.⁵⁵ Disamping

⁵¹ Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)," *Jurnal Hukum* 16 (2), 2009.

⁵² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10, Ayat 3.

⁵³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Renstra Kemenlu 2015-2019," terakhir dimodifikasi 2015, diakses 16 Juni 2023, http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/ENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf

⁵⁴ Andrini Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi," *Politica* 7 (1), 2016.

⁵⁵ Andrini Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi."

kepentingan ekonomi, pemerintah pusat Indonesia mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan diplomasi luar negeri atau paradiplomasi juga untuk mencapai kepentingan di bidang sosial budaya. Pemerintah daerah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia ke dunia internasional melalui kerja sama luar negeri. Selain itu, pemerintah daerah Indonesia juga diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat memaksimalkan pembangunan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kepentingan politik luar negeri Indonesia lainnya dalam paradiplomasi adalah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.⁵⁶ Hal ini karena melalui paradiplomasi maka akan terbentuk kerja sama sehingga dapat meminimalisir perpecahan di Indonesia. Dari kepentingan politik luar negeri Indonesia tersebut, paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia merupakan paradiplomasi pada lapisan kedua. Maksud paradiplomasi lapisan kedua adalah kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah subnasional yang tidak hanya terfokus pada kepentingan ekonomi tetapi juga pada berbagai bidang lainnya seperti bidang sosial dan budaya⁵⁷

Dalam melakukan aktivitas paradiplomasi, pemerintah daerah Indonesia harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat Indonesia yang bertanggung jawab dalam aktivitas paradiplomasi adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki wewenang untuk

⁵⁶ Andriani Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi."

⁵⁷ Andre Lecours, *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, (Netherlands: Desiree Davidse, 2008), 3.

mengkoordinir dengan memberikan saran dan pertimbangan politis atau yuridis terhadap program-program dalam kerja sama luar negeri tersebut.⁵⁸ Ketika aktivitas paradiplomasi seperti kerja sama *sister city* kota di Indonesia telah terjalin dengan kota di negara lain maka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di kota negara mitra kerja sama tersebut bertugas dalam mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama *sister city* kota-kota Indonesia.

Dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama *sister city* atau bentuk kerja sama luar negeri lainnya, diantaranya sebagai berikut.⁵⁹

1. Kerja sama luar negeri harus dilakukan dengan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dan sesuai dengan kerangka negara kesatuan.
2. Kerja sama luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Adanya persetujuan dari DPRD terkait kerja sama dan program-programnya.
4. Tidak mengganggu stabilitas dan keamanan politik dalam negeri.
5. Tidak melanggar prinsip non intervensi.
6. Harus berdasarkan persamaan hak dan prinsip persamaan kedudukan.
7. Kerja sama luar negeri harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri pemerintah pusat.

⁵⁸ Departemen Luar Negeri, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003), 16.

⁵⁹ Departemen Luar Negeri, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003), 20,21.

9. Tidak mengancam keamanan nasional.
10. Bersifat legal
11. Tidak mengakibatkan kerugian bagi bangsa.

Syarat-syarat tersebut wajib untuk dipenuhi pemerintah daerah agar mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk melakukan kerja sama *sister city* atau paradiplomasi lainnya.

2.1.1 Hukum yang Menjadi Landasan Paradiplomasi di Indonesia.

Landasan konstitusional yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945, yang berbunyi :

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Namun Pasal 11 UUD 1945 tersebut belum menjelaskan mengenai wewenang pemerintah daerah di Indonesia dalam pembuatan perjanjian internasional ataupun pelaksanaan hubungan luar negeri. Selanjutnya menanggapi Pasal 11 UUD 1945 yang berkaitan dengan makna dari kalimat “Persetujuan DPR” yang masih belum jelas, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.⁶⁰ Dalam surat tersebut, Presiden menyampaikan bahwa tidak semua perjanjian internasional harus dibentuk atas persetujuan DPR, tetapi hanya perjanjian yang

⁶⁰ Delfina Gusman dan Zimtya Zora, “Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara),” *UIRLawReview* 5 (1), 2021.

bersifat penting saja yang memerlukan persetujuan DPR.⁶¹ Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dalam Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 tersebut meliputi :

- (1) Hal-hal politik atau hal-hal yang dapat mempengaruhi Haluan politik luar negeri, seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan atau aliansi, dan perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
- (2) Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara.
- (3) Hal-hal yang menurut UUD atau berdasarkan sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang seperti masalah kewarganegaraan dan masalah-masalah kehakiman.

Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai landasan hukum dalam melakukan hubungan luar negeri seperti kerja sama *sister city*.⁶² Hal tersebut karena dalam Ayat 1 Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 dijelaskan bahwa perjanjian persahabatan merupakan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR. Paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* dapat dikelompokkan dalam hubungan persahabatan. Namun dalam surat presiden tersebut belum diatur secara jelas mengenai wewenang dan tata pelaksanaan kerja sama luar negeri yang dijalin oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut karena pada saat itu, Indonesia masih menerapkan sentralisasi dimana semua urusan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, hingga tahun 1988 masih belum terdapat sumber hukum yang

⁶¹ Delfina Gusman dan Zimtya Zora, "Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara),"

⁶² Hendrik Sompotan, "Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 3 (3), 2016.

mengatur secara jelas mengenai kerja sama luar negeri oleh pemerintah subnasional atau yang disebut juga dengan paradiplomasi di Indonesia.

Selanjutnya, pada awal reformasi, sentralisasi diubah menjadi desentralisasi yang ditandai dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia kepada pemerintah daerah Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri atau paradiplomasi melalui pengeluan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun karena dalam penerapannya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut dinilai lebih mengarah kepada model pemerintahan negara bagian, seperti praktek pada negara-negara federal, maka pemerintah pusat Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak menyebutkan wewenang pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri secara eksplisit.⁶³ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diisyaratkan bahwa diperlukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri dengan kondisi Indonesia.

Selanjutnya, sumber hukum di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam paradiplomasi hingga saat ini yaitu Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan / atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Pertukaran budaya;
 - c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. Promosi potensi daerah; dan
 - e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

⁶³ Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)," *Jurnal Hukum* 16 (2), 2009.

- (2) Kerja sama daerah dengan lembaga dan / atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama daerah dengan lembaga dan / atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 367 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatur mengenai bidang-bidang yang dapat dijadikan fokus kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah.⁶⁴ Selanjutnya dalam Pasal 367 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.⁶⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa di Indonesia terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan paradiplomasi pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah daerah atau pemerintah subnasional negara lain.

Selain Undang-Undang, juga terdapat Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 yang dapat menjadi landasan pembentukan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah di Indonesia atau paradiplomasi. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 dijelaskan mengenai prinsip hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa hubungan yang dilakukan harus demi kepentingan nasional dengan prinsip bebas aktif, harus diadakan berdasarkan kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan, kemudian pemerintah daerah menghubungi kementerian dalam negeri yang berkonsultasi kepada kementerian luar negeri

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 367, Ayat 1.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 367, Ayat 2.

terkait dengan hubungan luar negeri yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan pertimbangan yuridis dan politis terkait hubungan tersebut.⁶⁶

2.2 Paradiplomasi Dalam Kebijakan Luar Negeri Jerman

Pada perang dunia I dan II, Jerman dikenal sebagai negara besar dan kuat. Selain itu, Jerman juga dikenal sebagai negara dengan agresivitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya Jerman menguasai dunia internasional. Namun pasca berakhirnya perang dunia kedua, Jerman mengalami kekalahan sehingga Pemerintah Jerman harus melakukan pembangunan negara kembali. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman untuk membangun kembali negaranya yang telah hancur adalah dengan menjalin kerja sama dengan berbagai negara. Hal ini juga bertujuan untuk membangun identitas nasional Jerman menjadi negara kooperatif yang dapat menciptakan perdamaian di dunia internasional pasca perang dunia kedua sehingga Jerman bisa mendapatkan penerimaan sebagai aktor yang sah di panggung internasional. Untuk mencapai hal tersebut Jerman memusatkan kerja sama luar negerinya pada multilateralisme.⁶⁷ Budaya kerja sama multilateralisme yang difokuskan oleh Jerman tersebut berhasil menjadikan Jerman sebagai negara federalisme yang paling banyak menjalin kerja sama luar negeri. Pemerintah federal Jerman menerapkan prinsip kesetaraan dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam mencapai kepentingan negaranya pasca kekalahan dalam perang dunia kedua, Pemerintah pusat Jerman mendorong pemerintah negara bagiannya untuk ikut mengambil peran dalam kerja sama luar negeri. Hal ini menjadikan Jerman

⁶⁶ Nabila Safitri, et al, "Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (1), 2023.

⁶⁷ Volker Stanzel, *Diplomatie für das 21. Jahrhundert. Sechs praktische Vorschläge*, (SWP Berlin: Deutsche Außenpolitik im Wandel, 2021), 13.

sebagai salah satu negara federal yang paling banyak melakukan aktivitas paradiplomasi di arena internasional. Bentuk aktivitas paradiplomasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah subnasional Jerman adalah kerja sama *sister city*. Jerman memulai kerja sama *sister city* nya pertama kali yaitu pada tahun 1947 antara Kota Crailsheim, Jerman dengan Kota Worthington, Amerika Serikat.⁶⁸ Hingga tahun 2021, Jerman berhasil menjadi negara dengan kerja sama *sister city* terbanyak di dunia, yaitu dengan lebih dari 7000 kerja sama yang telah dijalin.⁶⁹

Pemerintah federal Jerman meyakini bahwa dengan memperbanyak aktivitas paradiplomasi maka akan meningkatkan kapasitas dan keamanan negara Jerman di hubungan internasional. Hal tersebut karena pemerintah negara bagian dan pemerintah kota memiliki hubungan yang dekat dan langsung dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan ekonomi dan politik sehingga hubungan tersebut dapat dijadikan sebagai arena untuk mencapai kepentingan nasional Jerman. Pemerintah negara bagian Jerman dinilai berperan penting dalam mencapai dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri Jerman.⁷⁰

Kegiatan paradiplomasi Jerman berjalan seiringan dengan kebijakan luar negeri negara federal yang berbentuk seperti kerja sama lintas batas dan antar daerah, pembangunan ekonomi regional, kebijakan pembangunan, kebijakan budaya dan pendidikan, dan juga kebijakan suaka dan migrasi. Paradiplomasi Jerman didasarkan pada wawasan tentang keuntungan dari kontrol federalisasi dan kebutuhan terhadap solusi dari masalah lintas batas dan penggabungan bidang

⁶⁸ The Millenia-Long History of German Sister Cities, diakses 3 Juni 2023, <https://sistercities.org/2019/10/11/history-of-german-sister-cities/>

⁶⁹ Sister Cities International, diakses 3 Juni 2023, <https://sistercities.org/annual-report/>

⁷⁰ Anna-Lena Kirch, et al, "Municipal Foreign Policy," DGAP MEMO, 2021.

kekuatan dan keunggulan untuk menciptakan efek sinergi. Paradiplomasi dapat menciptakan wilayah ekonomi dan pasar serta tenaga kerja berdasarkan kesamaan struktural ekonomi yang kemudian akan mencapai keuntungan sosial ekonomi. Aktivitas paradiplomasi Jerman mencakup bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi negara federal, yaitu urusan sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan lingkungan. Dalam kerja sama *sister city* Jerman, kepentingan ekonomi berjalan beriringan dengan tujuan mengangkat profil suatu negara.⁷¹

Kebijakan luar negeri Jerman menetapkan bahwa fokus utama paradiplomasi Jerman adalah bidang pembangunan. Hal ini karena Jerman merupakan negara anggota Uni Eropa dimana dijelaskan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa bertanggung jawab atas pencapaian pembangunan berkelanjutan atau yang disebut juga dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁷² Kerja sama kota merupakan salah satu bagian dalam kerja sama pembangunan Jerman.⁷³ Dalam kerja sama kota atau kerja sama *sister city* Jerman, pemerintah pusat Jerman memfokuskan pemberian bantuan pembangunan terhadap negara-negara *global south* dalam bentuk pemberian dana dalam proyek pembangunan.⁷⁴ Hal tersebut dilakukan pemerintah Jerman sejalan dengan tujuan nomor 17 SDGs yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tujuan utama kerja sama luar negeri Jerman yang fokus pada pembangunan adalah untuk membantu mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, serta

⁷¹ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

⁷² Anna-Lena Kirch, et al, "Municipal Foreign Policy," DGAP MEMO, 2021.

⁷³ Michell Rohmann, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli, 2023.

⁷⁴ Michell Rohmann, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli 2023.

memperkuat demokrasi dan struktur negara hukum.⁷⁵ Pemerintah pusat Jerman telah menambahkan dana yang disediakan untuk kerja sama pembangunan luar negeri hingga tahun 2019 yaitu sebesar 8,3 miliar Euro. Dalam pemberian dana bantuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat Jerman menetapkan Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan luar negeri diserahkan kepada perwakilan Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Grup Bank KfW yang diutus di masing-masing negara yang bersangkutan.⁷⁶ Fokus utama kerja sama luar negeri Jerman pada bidang bantuan pembangunan ini berhasil menjadikan Jerman sebagai negara penyumbang terbesar kedua pada tahun 2018 setelah Amerika Serikat dalam bantuan pembangunan antar negara.

Tabel 2. 1 Status April 2018 OECD/DAC

AS	Jerman	Inggris	Jepang	Prancis
35,26%	24,68%	17,94%	11,48%	11,36%

Sumber: Nilai sementara, Status April 2018 OECD/DAC

Selain bidang pembangunan, kebijakan luar negeri Jerman juga menetapkan bahwa paradiplomasi Jerman juga fokus pada bidang pendidikan dan budaya. Hal ini karena Pemerintah Jerman memiliki kepentingan untuk menyebarkan Bahasa Jerman di panggung internasional, memperkenalkan Jerman sebagai negara dengan budaya yang beragam dan sukses, dan ingin menampilkan citra Jerman

⁷⁵ Bobby Hermada, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

⁷⁶ Bobby Hermada, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang – Hildesheim."

sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Pada bidang pendidikan dan budaya, pemerintah pusat Jerman memberikan kewenangan kepada beberapa badan nonprofit Jerman untuk melakukan kontrol dalam kerja sama dengan fokus kerja yang berbeda-beda. Badan-badan tersebut meliputi *Goethe-Institut*, *Institut für Auslandsbeziehungen* (ifa), *Deutscher Akademischer Austauschdienst* (DAAD), Komisi UNESCO Jerman, dan *Alexander-von-Humboldt-Stiftung*.⁷⁷

2.2.1 Hukum yang Menjadi Landasan Paradiplomasi di Jerman.

Dalam Resolusi Perdana Menteri Jerman dari tahun 1962 dan 1988 diatur mengenai pembagian wewenang pemerintah negara bagian dan pemerintah subnasional Jerman lainnya dalam melakukan kerja sama luar negeri. Dalam resolusi tersebut dijelaskan bahwa prioritas kerja sama luar negeri negara bagian adalah promosi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para spesialis atau tenaga ahli.⁷⁸ Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutam negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.⁷⁹

Dalam konstitusi dasar Jerman, pemerintah pusat Jerman telah menjelaskan terkait wewenang pemerintah negara bagian untuk dapat terlibat dalam kerja sama

⁷⁷ Bobby Hermanda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

⁷⁸ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

⁷⁹ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

luar negeri seperti kerja sama *sister city* secara jelas yaitu dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman.⁸⁰

- (1) *Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.*
- (2) *Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.*
- (3) *Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.*

Dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman ikut bertanggung jawab dalam menjaga hubungan luar negeri.⁸¹ Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman dijelaskan bahwa sebelum pemerintah negara bagian Jerman membuat kontrak kerja sama yang memberi pengaruh terhadap keadaan negara, pemerintah negara bagian tersebut harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman juga dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman dapat membentuk perjanjian dengan negara asing dengan ketentuan harus disetujui pemerintah pusat Jerman.⁸²

⁸⁰ Anna-Lena Kirch, et al, "Municipal Foreign Policy," DGAP MEMO, 2021.

⁸¹ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 32, Absatz 1.

⁸² Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 32, Absatz 3.

BAB III

PERKEMBANGAN PARADIPLOMASI KOTA PADANG DAN KOTA HILDESHEIM

Sistem tatanan dunia internasional yang semakin berkembang akibat fenomena globalisasi menjadikan negara-negara banyak melakukan kerja sama untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tidak hanya negara dengan sistem perekonomian berkembang yang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya, negara maju pun juga membentuk berbagai kerja sama untuk memaksimalkan perekonomian negaranya. Dalam memaksimalkan perekonomian negara, pemerintah pusat turut mendorong pemerintah subnasionalnya untuk membentuk kerja sama lintas batas negara agar dapat mencapai kepentingan perekonomian nasional. Hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia dan Jerman. Tidak hanya menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat Indonesia, Jerman juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia. Jerman merupakan salah satu negara maju yang mendorong pemerintah negara bagian dan pemerintah kotanya untuk menjalin paradiplomasi dengan negara lain. Kegiatan paradiplomasi yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah subnasional Jerman adalah kerja sama *sister city*. Pada tahun 1988, Pemerintah Kota Hildesheim, Jerman meresmikan aktivitas paradiplomasi dengan Pemerintah Kota Padang, Indonesia dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Hildesheim dari awal terbentuknya hingga tahun 2022.

3.1 Sejarah Terbentuknya Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim

Sebelum dibentuk dan diresmikannya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim, hubungan baik kedua kota ini telah dilakukan terlebih dahulu. Pada tahun 1986, terdapat 3 orang profesor dari *HAWK University Hildesheim* yang melakukan kunjungan ke salah satu universitas di Kota Padang yaitu Universitas Bung Hatta (UBH).⁸³ Kunjungan tersebut dilatar belakangi oleh ketertarikan profesor-profesor dari Hildesheim tersebut terhadap pengalaman-pengalaman para insinyur Indonesia yang sebelumnya telah mengikuti seminar reintegrasi di Fakultas Teknik *HAWK University Hildesheim*, yang mana salah satu insinyur Indonesia tersebut merupakan dosen di Universitas Bung Hatta. Selain itu, profesor-profesor tersebut memilih melakukan kunjungan ke Kota Padang karena profesor-profesor tersebut ingin mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan kerja praktek pada lokasi-lokasi konstruksi, pasokan air dan drainase, dan renovasi kota. Lokasi yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi lokasi kerja praktek tersebut adalah Kota Padang.⁸⁴ Melalui bantuan pihak UBH, mahasiswa dari *HAWK University Hildesheim* mendapat kesempatan untuk melakukan kerja praktek di Kota Padang.⁸⁵

Disamping hubungan baik yang dilakukan oleh professor *HAWK University, Hildesheim* dan pihak UBH, Padang, kontak pribadi antar masyarakat kedua kota ini juga mengambil peran dalam mendorong terbentuknya dan keberlangsungan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Oliver Rösner,

⁸³ Yulcherlina, et al, *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*, (Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018), 2.

⁸⁴ Yulcherlina, et al, 2.

⁸⁵ Yulcherlina, wawancara oleh penulis, zoom, 10 Agustus 2023.

penanggung jawab kerja sama internasional Kota Hildesheim menjelaskan bahwa faktor utama pendorong dan penggerak kerja sama ini diluar administrasi kedua kota adalah kontak pribadi antara orang-orang dari kedua belah pihak, yaitu seperti Admi Landri Schlüter (Mimi), orang Padang, Indonesia yang menikah dengan orang Jerman yang merupakan mahasiswa delegasi *HAWK University Hildesheim* yang bernama Roland Schlüter.⁸⁶ Roland dan Mimi ini memberi peran penting dalam pembentukan dan penggerakan kerja sama kedua kota ini karena ia memiliki kontak yang baik dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini sehingga ia berperan sebagai jembatan dalam pembentukan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini.⁸⁷ Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, Roland dan Mimi mengambil peran dalam menghubungkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerja sama ini dan menginformasikan program-program dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.⁸⁸

Selain melakukan kunjungan untuk kepentingan kerja praktek, delegasi Hildehsiem tersebut juga mengunjungi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang untuk menjalin hubungan baik dengan Kota Padang dan melakukan peninjauan kondisi Kota Padang. Setelah kunjungan delegasi Hildesheim tersebut, Pemerintah Kota Padang juga melakukan kunjungan ke Kota Hildesheim dan kegiatan saling mengunjungi tersebut dilakukan berulang kali. Adanya kegiatan saling mengunjungi dan pertukaran delegasi masing-masing kota ini menjadikan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim mulai

⁸⁶ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

⁸⁷ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

⁸⁸ Yulcherlina, wawancara oleh penulis, zoom, 10 Agustus 2023.

menjajaki kerja sama antara kedua kota ini.⁸⁹ Dalam penjajakan tersebut, pihak Hildesheim tertarik dengan arsitektur-arsitektur rumah tradisional di Kota Padang.⁹⁰ Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim.

Selain dilatar belakangi oleh hubungan baik antara pihak universitas di Kota Padang dan di Kota Hildesheim, paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini juga diinisiasi oleh pemimpin daerah di Sumatera Barat, yaitu saat Harun Zain menjadi Gubernur Sumatera Barat. Pada saat itu, kondisi Indonesia sedang berada dalam keterpurukan akibat pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Keterpurukan tersebut juga terjadi di Sumatera Barat. Sebagai pemerintah subnasional di Indonesia, Gubernur Sumatera Barat tentunya juga memiliki tugas dalam membantu pemerintah pusat untuk membangun kembali negara Indonesia agar keluar dari keterpurukan. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Barat berupaya untuk membangkitkan kondisi Provinsi Sumatera Barat melalui pembentukan kerja sama luar negeri. Gubernur Sumatera Barat tersebut melakukan koordinasi dengan kakaknya, Zairin Zain yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jerman Barat. Melalui Zairin Zain tersebut terbukalah jalan untuk melakukan kerja sama *sister city* antara kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang dengan kota di Jerman Barat yaitu Kota Hildesheim.⁹¹

⁸⁹ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

⁹⁰ Yulcherlina, wawancara oleh penulis, zoom, 10 Agustus 2023.

⁹¹ Yulcherlina, et al, *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*, (Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018), 1.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat memilih Kota Padang untuk menjadi kota yang akan melakukan kerja sama luar negeri dengan Jerman. Hal tersebut karena pada saat itu Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Walikota Padang saat itu juga pernah mengikuti pertemuan kerja sama *sister city* Kota Bandung, Indonesia dengan Kota Braunschweig, Jerman sehingga pertemuan tersebut menjadi awal mula dari peninjauan kerja sama *sister city* Kota Padang dengan Kota Hildesheim. Dalam peninjauan kerja sama tersebut, Kota Padang tertarik untuk menjalin kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim karena Kota Hildesheim merupakan kota yang memiliki potensi unggulan di bidang budaya.⁹²

Pada saat Indonesia dalam masa keterpurukan akibat pergolakan PRRI, Jerman sedang dalam masa pembenahan dan pembangunan kembali negara akibat perang dunia kedua. Dalam masa pembenahan tersebut, Jerman memiliki kepentingan untuk memperbaiki identitas nasional negaranya sehingga pemerintah pusat Jerman mendorong pemerintah negara bagian dan pemerintah kota-kotanya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi lawannya saat perang dunia kedua melalui pembentukan berbagai kerja sama seperti kerja sama *sister city*.⁹³ Salah satu bentuk kerja sama yang dibentuk oleh pemerintah subnasional Jerman pada saat itu adalah kerja sama *sister city* antara Kota Hildesheim, Jerman dengan Kota Padang, Indonesia.

Pada tanggal 20 Juni 1988, Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim meresmikan paradiplomasi Kota Padang, Indonesia dengan Kota

⁹² Yulcherlina, et al, 1.

⁹³ Yulcherlina, et al, 1.

Hildesheim, Jerman dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Kerja sama ini membentuk perjanjian internasional berupa *Administrative Arrangement* dan kemudian diperbaharui dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). *Administrative Arrangement* tersebut ditanda tangani oleh Walikota Padang, Syahrul Ujud dan Direktur Kota Hildesheim, Dr. Wilhelm Buerstedde.⁹⁴

Selain karena kepentingan para profesor Hildesheim dalam bidang pendidikan di Kota Padang, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini juga dilatar belakangi atas kesamaan kepentingan kedua kota dalam wisata bangunan bersejarah.⁹⁵ Hal tersebut karena Kota Padang dan Kota Hildesheim merupakan kota yang sama-sama memiliki potensi unggulan daerah pada bangunan bersejarah. Dengan demikian, kedua kota ini ingin saling memberikan informasi dan pengetahuan terkait pemeliharaan arsitektur bangunan bersejarah melalui pembentukan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.⁹⁶ Selain itu, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini juga dilatar belakangi oleh faktor keinginan Pemerintah Kota Padang untuk memajukan Kota Padang di bidang pendidikan dan teknologi.⁹⁷ Kota Hildesheim merupakan kota maju di Jerman sehingga pemilihan Kota Hildesheim sebagai mitra kerja sama *sister city* Kota Padang sangat tepat. Walaupun terdapat perbedaan karakteristik yang jelas antara kedua kota ini dimana Kota Padang bukan merupakan kota maju sehingga banyak kepentingan dalam kerja sama ini terlihat hanya akan menguntungkan Kota Padang tetapi Pemerintah Hildesheim tetap menyepakati fokus kerja sama pada bidang pendidikan dan

⁹⁴ Yulcherlina, et al, 2.

⁹⁵ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

⁹⁶ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

⁹⁷ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

teknologi. Hal tersebut karena Kota Hildesheim sebagai kota maju di Jerman juga memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan politik luar negeri Jerman yaitu sebagai negara maju yang berkomitmen dalam membantu pembangunan negara lain terutama negara berkembang. Untuk mencapai kepentingan tersebut maka Pemerintah Kota Hildesheim mengambil langkah untuk memfasilitasi tenaga ahli dalam kerja sama kotanya.⁹⁸

Sama halnya dengan kerja sama *sister city* Bandung-Braunschweig, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini pada awalnya juga berfokus pada bidang pendidikan dan budaya. Namun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini dinilai memiliki pola yang unik dan menarik karena terdapat ketimpangan potensi antara kedua kota ini dimana Kota Padang bukan merupakan kota yang maju dalam pendidikan sedangkan Kota Hildesheim maju dalam bidang pendidikan dan teknologi.⁹⁹ Walaupun demikian, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim di bidang pendidikan sangat aktif dan terdapat banyak program kerja sama pada bidang ini. Kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim juga telah berlangsung selama 34 tahun dan masih aktif hingga saat ini.

3.2 Perluasan Ruang Lingkup Fokus Kerja Sama dalam Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim

Pada tahun 1988, Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim meresmikan perjanjian kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dalam bentuk *Administrative Agreement*. Dalam Pasal 2 *Administrative Agreement* tahun 1988 ini

⁹⁸ Declaration of Interest by Municipal Partnerships Wishing to Participate in the Program: experts for Municipal Partnerships Worldwide.

⁹⁹ Bobby Hermanda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

dijelaskan mengenai ruang lingkup yang akan menjadi fokus dalam kerja sama *sister city* ini, dimana kerja sama ini akan berfokus pada pertukaran mahasiswa dan pelatihan staf, pertukaran informasi, pertukaran budaya, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kerja sama.¹⁰⁰ Selanjutnya, dalam Minutes of Meeting (MoM) kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tahun 2015, dijelaskan bahwa kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini memperluas ruang lingkup kerja samanya pada 3 bidang, yaitu pertukaran pelajar, *industry traineeship*, dan revitalisasi bangunan bersejarah.¹⁰¹ Tepat pada 30 tahun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini telah berlangsung yaitu pada tahun 2018, *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tahun 2018 kembali memperluas ruang lingkup kerja samanya pada beberapa bidang sehingga kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini mencakup berbagai bidang yang meliputi pertukaran mahasiswa dan pelatihan staf, pertukaran informasi, pertukaran budaya, perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kerja sama, pelatihan untuk industri, revitalisasi bangunan bersejarah, pengembangan perencanaan perkotaan, manajemen pengurangan resiko bencana, penanganan limbah dan manajemen lingkungan, dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau tuna netra.¹⁰²

¹⁰⁰ Administrative Arrangement Between The Municipal Government of Padang, West Sumatera, Indonesia and The Municipal Government of Hildesheim, Lower Saxony, Federal Republic of Germany, Concerning City Cooperation 1988, Article 2.

¹⁰¹ Minutes of Meeting Between The Vice Mayor of The City of Padang and The Mayor of The City of Hildesheim On The Implementation of Sister City Cooperation Between Padang and Hildesheim, 2015.

¹⁰² Yulcherlina, et al, *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*, (Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018), 35.

3.3 Program-program dan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Dalam Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Hingga Tahun 2022

Hingga tahun 2022, aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim masih berlanjut dan telah berlangsung selama 34 tahun. Selama 34 tahun, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini telah melakukan berbagai macam program. Program-program dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tersebut telah dilakukan pada berbagai bidang. Adapun bentuk program-program dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim adalah sebagai berikut.

1. Bidang pendidikan.
 - a. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk kerja praktek oleh mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH) ke Hochschule für Angewandte und Kunst (HAWK) dan mahasiswa HAWK ke UBH.

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini dimulai sejak tahun 1988 dimana terdapat 2 mahasiswa HAWK yang diutus untuk melakukan studi di UBH. Selanjutnya pada tahun 1996, UBH ikut mengirim mahasiswanya ke HAWK sebanyak 4 orang. Pada tahun berikutnya, kegiatan pertukaran mahasiswa ini aktif berlanjut. Hingga tahun 2015, jumlah pertukaran mahasiswa UBH di HAWK sebanyak 86 orang dan jumlah pertukaran mahasiswa HAWK di UBH sebanyak 42 orang.¹⁰³

¹⁰³ Yulcherlina, et al, 36.

- b. Pertukaran staf pengajar dalam pelaksanaan seminar.

Sama halnya dengan kegiatan pertukaran mahasiswa, kegiatan pertukaran staf pengajar dalam pelaksanaan seminar ataupun *workshop* aktif dilakukan hingga saat ini. Hingga tahun 2018, jumlah staf pengajar UBH yang telah berkunjung ke HAWK sebanyak 29 orang. Tidak hanya staf pengajar UBH yang berkunjung ke HAWK, staf pengajar HAWK juga ikut melakukan kunjungan ke UBH. Hingga tahun 2018, jumlah staf pengajar HAWK yang telah berkunjung ke UBH sebanyak 17 orang.¹⁰⁴

- c. Penelitian bersama antara tim profesor dan mahasiswa HAWK dengan tim dosen dan mahasiswa Teknik Sipil UBH.

Dalam penelitian bersama ini, topik yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah pembangunan Rumah Padang dalam bentuk rumah prefabrikasi untuk Kota Padang di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rumah siap jadi dengan konsep yang sederhana dan nyaman, harga terjangkau oleh masyarakat, proses pembuatan rumah yang cepat, dan material yang digunakan berasal dari limbah yang telah didaur ulang. Sasaran dalam program Rumah Padang ini adalah agar masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki rumah hunian yang sehat dan nyaman dan dapat mengedukasi masyarakat Kota Padang untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara pemilihan dan pemilahan sampah. Dalam program penelitian ini, Pemerintah Jerman memberikan bantuan sumbangan dana sebesar 750.000 Euro.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Yulcherlina, et al, 40.

¹⁰⁵ Yulcherlina, et al, 45.

- d. Pelaksanaan program spesialisasi bagi mahasiswa UBH di HAWK.

Program spesialisasi ini berfokus pada bidang teknik sipil dan arsitektur. Dalam program ini, terdapat 2 orang alumni Teknik Sipil UBH yang mengikuti kegiatan spesialisasi, yaitu Yulcherlina dan Desy Aryanti. Kegiatan spesialisasi ini berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 2000.¹⁰⁶

- e. Program *Engineering For Indonesia* (EFI)

Program EFI merupakan program beasiswa yang disponsori oleh profesor dari Hildesheim dan diberikan kepada para pelajar SMK di Provinsi Sumatera Barat yang menjalin kerja sama dengan UBH. Program beasiswa ini telah diberikan kepada 15 pelajar di Sumatera Barat. Melalui program EFI dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, para pelajar SMK dari Provinsi Sumatera Barat tersebut telah berhasil bekerja di berbagai perusahaan konstruksi di Indonesia dan Jerman.¹⁰⁷

- f. Magang atau kursus singkat ONDT Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) UBH di HAWK

Program kursus singkat ONDT ini telah diikuti oleh 4 orang Tim Dosen Jurusan Teknik Sipil FTSP UBH di HAWK pada tahun 2007 dengan topik yang berbeda-beda. Ir. Afrizal Naumar, M.T mengikuti kursus singkat ONDT dengan topik "*Hydraulics and Water Resource Engineering.*" Ir. Hendri Warman, MSCE mengikuti kursus singkat ONDT dengan topik "*Shear Strength of Soils.*" Ir. Taufik, M.T mengikuti kursus singkat ONDT dengan topik "*Buckling of Pipe Column with*

¹⁰⁶ Yulcherlina, et al, 47.

¹⁰⁷ Yulcherlina, et al, 47.

Variable Section of Bamboo Joint Along.” Indira Khaidir, S.T., M.Sc mengikuti kursus singkat ONDT dengan topik “*Tendering Process in Germany.*”¹⁰⁸

g. Konferensi dan *workshop* internasional.

Program konferensi dan *workshop* internasional ini telah dilakukan sebanyak 2 kali. Konferensi pertama dilakukan pada tanggal 5 hingga 8 Juli 2007 di HAWK Holzminden dengan nama konferensi yaitu *Global Playing Conference*. Konferensi ini diikuti oleh 18 universitas dari 15 negara di dunia dan dihadiri oleh 2 Menteri Jerman, yaitu Mr. Bernard Busemann (Menteri Pendidikan) dan Mr. Lutz Stratmann (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Konferensi ini bertema “*Let’s Work Together.*” Dalam konferensi ini, rektor UBH, Yunazar Manjang dan staf pengajar UBH, Dr. Rini Mulyani, S.T., M.Sc dan Yulcherlina, S.T.,M.T yang menjadi pemakalah. Pemakalah dari UBH tersebut berhasil meraih prestasi sebagai salah satu pemakalah terbaik.¹⁰⁹ Selanjutnya konferensi internasional kedua dilakukan pada tanggal 21 Februari hingga 3 Maret 2008 di Hotel Grand Inna Muara Kota Padang. Konferensi ini bertema “*International Asset and Facility Management.*” Konferensi ini merupakan program dari kerja sama 5 universitas, yaitu UBH, HAWK, Universitas Teknologi Malaysia, Chennai University India, dan Queensland University of Technology Australia. Yang menjadi pemakalah dalam konferensi internasional ini merupakan profesor dari HAWK yaitu Prof. Roland Herr.¹¹⁰

¹⁰⁸ Yulcherlina, et al, 48.

¹⁰⁹ Yulcherlina, et al, 48.

¹¹⁰ Yulcherlina, et al, 50.

- h. *Short course* ONDT untuk dosen Institut Teknologi Padang (ITP) dan Universitas Eka Sakti (UNES) Padang di HAWK melalui kerja sama dengan UBH.

Pada tahun 2006, paradiplomasi Padang-Hildesheim di bidang Pendidikan ini kembali membentuk program kursus singkat ONDT untuk para dosen. Namun program *short course* ONDT ini tidak diikuti oleh dosen dari UBH tetapi diikuti oleh 2 orang dosen dari ITP Padang dan 2 orang dosen dari UNES Padang. Dosen dari ITP dan UNES Padang tersebut dapat mengikuti program tersebut melalui kerja sama dengan UBH.¹¹¹

2. Bidang olahraga.

Dalam rapat evaluasi kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim pada tahun 1994 disepakati bahwa Pemerintah Kota Hildesheim akan memberikan bantuan dana pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Haji Agus Salim Padang sebesar 50 juta Rupiah. Selain itu juga disepakati bahwa Pemerintah Kota Hildesheim akan memfasilitasi Indra Syafrie untuk dipersiapkan sebagai pelatih sepakbola profesional. Melalui bantuan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim kepada Indra Syafrie tersebut, berhasil mendorong Indra Syafrie menjadi pelatih sepakbola tim nasional Indonesia U-19.¹¹²

3. Bidang kesenian dan budaya.

Pada tahun 1995, kegiatan kerja sama di bidang kesenian dan budaya antara Kota Padang dan Kota Hildesheim dimulai dimana Kota Padang dikunjungi oleh

¹¹¹ Yulcherlina, et al, 50.

¹¹² Yulcherlina, et al, 51.

tim kesenian Kota Hildesheim dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat Kota Padang mengenai seni dan budaya Kota Hildesheim. Pada tahun yang sama, delegasi tim kesenian Kota Padang juga dikirim ke Hildesheim bersamaan dengan Kepala Dinas Kota Padang dan anggota DPRD dengan tujuan untuk melakukan pertunjukan dan pameran budaya di Kota Hildesheim. Kegiatan pertunjukan dan pameran budaya oleh tim kesenian Kota Padang di Hildesheim dilakukan selama bulan Juni hingga November 1995.¹¹³ Selanjutnya pada 23 Juni 1998 dilaksanakan kegiatan Muhibah Delegasi Budaya dan Pariwisata Sumatera Barat ke Kota Hildesheim dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama *sister city* Kota Padang dan Kota Hildesheim. Selain itu, kegiatan Muhibah Delegasi Budaya dan Pariwisata Sumatera Barat dilakukan untuk meningkatkan hubungan masyarakat Sumatera Barat dengan masyarakat Hildesheim melalui kegiatan kesenian, budaya, dan promosi pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan di pusat pertokoan yang ramai pengunjung di Hildesheim. Dalam kegiatan ini, turut hadir mitra kerja sama *sister city* Kota Hildesheim lainnya, yaitu Kota Pavia Italia, Kota Weston England, Kota Angouleme Prancis, Kota El Mania Mesir, dan Kota Gellenjik Rusia.¹¹⁴

4. Bidang pertanian.

Dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim di bidang pertanian, disepakati pembentukan program Bina Masyarakat (Bimas) dimana Pemerintah Federal Jerman mengirimkan tenaga ahli pertanian ke Kota Padang dengan tujuan

¹¹³ Yulcherlina, et al, 51.

¹¹⁴ Yulcherlina, et al, 54.

untuk meningkatkan produksi pertanian Kota Padang.¹¹⁵ Program ini berbentuk penyuluhan massal dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan panca usaha tani yang meliputi penggunaan bibit unggul, penetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan. Sasaran dalam program ini adalah agar Kota Padang dapat menjadi kota yang dapat menyumbangkan hasil produksi beras berkualitas. Dengan adanya kerja sama penerapan Bimas pertanian antara Kota Padang dan Kota Hildesheim ini berhasil mendorong Kota Padang sebagai salah satu kota yang berperan dalam pencapaian Indonesia sebagai negara pengekspor beras.¹¹⁶

5. Perencanaan teknis dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Padang.

Program pengelolaan TPA Air Dingin Padang mulai diinisiasi pada tahun 2015 dimana pada saat itu Pemerintah Kota Padang dan tim UBH melakukan kunjungan ke TPA di Kota Hildesheim yang bernama Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH). Dalam kunjungan tersebut, dilakukan obeservasi terkait proses pemilahan dan daur ulang sampah di Kota Hildesheim sehingga dapat menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat Hildesheim.¹¹⁷

6. Bidang air minum dengan PDAM.

Kerja sama di bidang air minum ini dilatar belakangi oleh minimnya persediaan air bersih di Kota Padang sehingga pada tanggal 20 Mei 1992, PDAM

¹¹⁵ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹¹⁶ Yulcherlina, et al, 54.

¹¹⁷ Yulcherlina, et al, 55.

Kota Padang memutuskan untuk meminta bantuan Pemerintah Kota Hildesheim dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PDAM terhadap pelayanan penyediaan air bersih. Dalam program ini, dana yang digunakan berasal dari dana bantuan yang disalurkan melalui lembaga *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW).¹¹⁸

7. Bantuan pasca gempa 2009.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Hildesheim dan HAWK memberikan bantuan dana kepada Kota Padang. Pemerintah Kota Hildesheim memberikan dana sebesar 8000 Euro kepada tim UBH untuk membantu mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat di sekitar lingkungan UBH. Dan dana sebesar 7000 Euro diberikan kepada Pemerintah Kota Padang untuk perbaikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.¹¹⁹

8. Kunjungan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi ke Hildesheim pada tanggal 10 Februari 2012.

Pada tanggal 10 Februari 2012, Pemerintah Kota Padang mendapat kesempatan untuk menghadiri acara Malam Penggalangan Dana untuk Kota Padang di Hildesheim sekaligus untuk mendiskusikan terkait peningkatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim di berbagai bidang. Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Padang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). Salah satu agenda dalam acara ini adalah pertemuan antara delegasi Kota Padang dengan Dekan

¹¹⁸ Yulcherlina, et al, 56.

¹¹⁹ Yulcherlina, et al, 56.

Fakultas Teknik Konstruksi HAWK, dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan penguatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim di bidang pendidikan yang meliputi kegiatan pertukaran mahasiswa dan program double degree HAWK dengan 2 universitas di Kota Padang yaitu UBH dan Universitas Andalas (Unand).¹²⁰ Agenda selanjutnya dalam acara ini membahas mengenai usulan Pemerintah Kota Padang terkait kerja sama di bidang tata kota. Pemerintah Hildesheim menyetujui usulan Pemerintah Kota Padang tersebut dan akan memberikan bantuan dalam bidang revitalisasi bangunan bersejarah di Kota Padang dengan cara pemberian pelatihan singkat di bidang manajemen lingkungan, pengolahan limbah, sanitasi, dan tata ruang bagi staf Pemerintah Kota Padang.¹²¹ Selanjutnya, agenda lainnya dalam acara ini yaitu presentasi dari pihak HAWK mengenai proyek kerja sama dengan UBH dan pemaparan oleh pihak MERC Jerman mengenai bantuan kemanusiaan pasca gempa 2009 Kota Padang.¹²² Dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2012, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Hamburg akan melaksanakan perayaan hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang telah berlangsung selama 60 tahun sehingga hubungan diplomatik tersebut harus dimaksimalkan dengan peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Dengan demikian, Konjen RI Hamburg menyampaikan bahwa Indonesia mendukung peningkatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.¹²³

¹²⁰ Yulcherlina, et al, 57.

¹²¹ Yulcherlina, et al, 58.

¹²² Yulcherlina, et al, 61.

¹²³ Yulcherlina, et al, 63.

9. Peringatan 25 tahun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

Pada tanggal 21 hingga 25 Juni 2013 dilaksanakan acara peringatan 25 tahun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim di Kota Hildesheim. Dalam acara ini dilakukan kegiatan promosi seni dan budaya oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim.¹²⁴ Selain itu, kegiatan ini juga diisi oleh pameran miniatur rumah adat Minangkabau yang dibawa oleh tim UBH.¹²⁵

10. Promosi terpadu Indonesia dalam “*Information Evening*” *sister city* Padang-Hildesheim.

Acara promosi terpadu Indonesia dalam “*Information Evening*” merupakan bagian dari kerangka kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014. Fokus utama acara ini adalah mempromosikan perekonomian Indonesia melalui investasi pada objek wisata dan kebudayaan serta kuliner yang dimiliki Indonesia.¹²⁶ Dalam acara ini, Konjen RI Hamburg juga mempromosikan Kota Padang sebagai salah satu kota metropolitan besar di Indonesia yang semakin berkembang sehingga KJRI Hamburg akan memfasilitasi kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim yang akan meningkatkan *people to people contact* kedua negara ini.¹²⁷

¹²⁴ Yulcherlina, et al, 63.

¹²⁵ Yulcherlina, et al, 65.

¹²⁶ Yulcherlina, et al, 66.

¹²⁷ Yulcherlina, et al, 69.

11. Kunjungan Wakil Walikota Padang Emzalmi dalam rangka penguatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.

Pada tanggal 19 hingga 22 Juni 2015 Pemerintah Kota Padang melakukan kunjungan ke Kota Hildesheim dalam memperingati kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim selama 27 tahun. Kunjungan ini menghasilkan peningkatan komitmen kerja sama kedua kota dalam bentuk penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) pada tanggal 19 Juni 2015.¹²⁸ MoM ini berisikan peningkatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim pada 3 bidang utama, yaitu pertukaran pelajar, pengiriman tenaga magang dari Kota Padang ke berbagai sektor industri di Hildesheim, dan revitalisasi bangunan bersejarah.¹²⁹ Menanggapi peningkatan komitmen kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, KJRI Hamburg menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh hal tersebut karena kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang mencapai 6% dalam 7 tahun terakhir, atau sedikit di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang tersebut didukung oleh sektor perdagangan dan pariwisata.¹³⁰

12. Kunjungan Sekretaris Daerah Kota Padang Ir. Asnel, M.Si dan delegasi ke Kota Hildesheim

Pada tanggal 14 hingga 22 Juni 2017 Sekretaris Daerah Kota Padang mendatangi Hildesheim untuk memenuhi undangan dalam konferensi yang

¹²⁸ Yulcherlina, et al, 70.

¹²⁹ Minutes of Meeting between The Vice Mayor of The City of Padang and The Mayor of The City of Hildesheim on the Implementation of Sister City Cooperation Between Padang and Hildesheim 19 Juni 2015.

¹³⁰ Yulcherlina, et al, 72.

diadakan *Engagement Global* yang bertema “*Second Conference of Municipal Partnership with Asia in Bonn.*” Dalam kunjungan ini terdapat beberapa agenda kerja. Pertama, dalam rangka melihat produk-produk unggulan dan teknologi pengolahan limbah sampah yang diterapkan oleh *SSI Schafer Jerman* yang sedang menawarkan kerja sama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kota Padang. Kedua, membahas rancangan program lanjutan dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Ketiga, menghadiri konferensi yang diadakan oleh *Engagement Global* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait *Sister City Best Practice* serta untuk mendapatkan peluang bantuan dalam skema *sister city* yang diwadahi oleh Pemerintah Jerman. Keempat, mengamati penataan kota di Eropa yang meliputi bidang transportasi, pariwisata, tata kota dan wilayah, pengelolaan sampah, sanitasi, perparkiran, dan pemeliharaan gedung-gedung bersejarah.¹³¹

13. Kunjungan delegasi Kota Padang yang diwakili oleh Asisten Sekretariat Daerah Kota Padang

Pada tanggal 3 hingga 10 Maret 2018 Asisten Sekretariat Daerah Kota Padang melakukan pertemuan dan peninjauan lapangan dalam 4 *working group* di Hildesheim, yang meliputi *Town Planning/Heritage group*, *Waste Management group*, *Fire Department group*, dan *Industry group*. Dalam pertemuan ini juga disepakati mengenai *mapping* kondisi pengelolaan bangunan bersejarah dan *mapping* kondisi *waste management* di Kota Padang, serta berbagi pengetahuan tentang pengelolaan penanggulangan bencana di Hildesheim oleh *expert* dari

¹³¹ Yulcherlina, et al, 78, 79.

Hildesheim yang akan dilaksanakan pada Agustus 2018.¹³² Selanjutnya pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan perpanjangan dan pembaruan MoU kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dengan periode 2018-2023. Dalam perpanjangan MoU ini disepakati 3 pembaharuan ruang lingkup kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim, yaitu bidang budaya, pariwisata, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bentuk-bentuk program yang disepakati dalam pembaharuan MoU ini meliputi pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen bangunan warisan budaya dan perawatannya, program pengembangan kesenian tradisional, manajemen tujuan pariwisata, dan peningkatan kapasitas di bidang tertentu yang akan diatur secara tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹³³ Dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa Yayasan Hildesheim yang bernama Hildesheimer Blinden Mission yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus akan membantu pelajar tuna netra di Kota Padang dalam bentuk pelatihan tenaga guru/dosen, bantuan alat praga, dan buku-buku mata pelajaran yang menggunakan huruf *braille*.¹³⁴ Bantuan dari Hildesheimer Blinden Mission ini merupakan bentuk komitmen Jerman sebagai negara maju yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) dan implementasi dari target 4.5 tujuan nomor 4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia berkewajiban untuk menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan

¹³² Yulcherlina, et al, 100, 101.

¹³³ Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hildesheim, Provinsi Lower Saxony, Republik Federal Jerman Mengenai Kerja Sama Kota Bersaudara 2018, Pasal 3.

¹³⁴ Yulcherlina, et al, 105.

termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

14. Evaluasi kerja sama *sister city* Kota Padang dan Kota Hildesheim melalui KJRI Hamburg pada acara *Indonesian Evening* di Hildesheim.

Pada tanggal 28 November 2018 diadakan acara *Indonesian Evening* di Hildesheim dalam rangka evaluasi 30 tahun hubungan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Acara ini didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia dimana KBRI Berlin ikut mengisi acara dengan menyediakan kuliner Indonesia. Dalam acara ini, KJRI Hamburg menjelaskan bahwa hubungan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim selama 30 tahun ini dapat dikatakan aktif dan mengalami peningkatan karena kedua kota saling mempercayai satu sama lain.¹³⁵

15. Program *Wash Management of Batang Arau River* Kota Padang.

Program *Wash Management of Batang Arau River* Kota Padang ini berlangsung pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air Sungai Batang Arau Padang dari level 4 menjadi level 2.¹³⁶ Hal tersebut karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau terletak pada pusat kegiatan ekonomi, industri, dan mobilitas masyarakat Kota Padang sehingga hal ini tentunya tidak sejalan dengan target 6.3 tujuan nomor 6 SDGs bahwa “Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan

¹³⁵ Yulcherlina, et al, 107, 108.

¹³⁶ Minutes of Appraisal Mission, “Expert Support for Municipal Partnership Padang – Hildesheim,” 2019.

secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.” Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Hildesheim yang merupakan bagian dari negara Jerman yang berkewajiban dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dunia, maka Pemerintah Kota Hildesheim mengirimkan tenaga ahli hidrologi ke Kota Padang untuk menangani permasalahan DAS Batang Arau Padang tersebut.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim untuk membantu program *wash management of Batang Arau River* ini merupakan bentuk implementasi kepatuhan Pemerintah Hildesheim terhadap politik luar negeri Jerman pada program *Engagement Global*. Dalam program tersebut, pemerintah federal Jerman akan memberikan bantuan pembangunan bagi mitra kerja sama kotanya untuk menyelesaikan permasalahan global.¹³⁷



¹³⁷ Engagement Global: About Us, diakses 13 Agustus 2023, <https://skew.engagement-global.de/about-us.html>

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BERKEMBANGNYA AKTIVITAS PARADIPLOMASI KOTA PADANG DAN KOTA HILDESHEIM PADA TAHUN 1988-2022

Berdasarkan pemaparan data dalam bab 2 dan bab 3, maka data-data tersebut dapat dijadikan bahan dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 dengan menggunakan konsep paradiplomasi oleh Kuznetsov yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi. Kuznetsov menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator yang menjadi faktor eksternal yang menyebabkan suatu paradiplomasi berkembang, meliputi faktor globalisasi, regionalisasi, demokratisasi, dan domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri.¹³⁸ Sedangkan, faktor internal yang menyebabkan suatu paradiplomasi berkembang terdiri dari 6 indikator, yaitu faktor federalisasi dan desentralisasi, masalah dengan proses pembangunan bangsa, kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri, asimetri unit penyusun, stimulus luar, peran pemimpin daerah atau partai politik, dan peran perbatasan.¹³⁹ Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022, penulis mengelompokkan penjelasan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022

¹³⁸ Alexander S. Kuznetsov, 102-104.

¹³⁹ Alexander S. Kuznetsov, 105-108.

dari dua perspektif, yaitu dari perspektif Kota Padang dan dari perspektif Kota Hildesheim.

4.1 Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Padang

Dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim yang dibentuk pada tahun 1988 ini, penulis menemukan beberapa faktor dari perspektif Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* Kota Padang dan Kota Hildesheim tersebut.

Faktor eksternal Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Globalisasi.

Adanya fenomena globalisasi menjadikan menipisnya batas-batas antar negara sehingga memberikan kesempatan kepada entitas subnasional untuk mencapai kepentingan nasional dan kepentingan daerahnya melalui kerja sama lintas batas negara. Berkembangnya fenomena globalisasi juga menyebabkan pergeseran fokus negara dari *high political issues* menjadi *low political issues*. Melalui perkembangan globalisasi, negara-negara di dunia dapat melakukan perundingan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu politik rendah tersebut. Dengan demikian, timbul kesepakatan agenda 2030 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh negara di dunia. Adanya kewajiban negara-negara untuk

mencapai SDGs menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberlangsungan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini. Dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional Indonesia ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Terdapat 2 program yang dibentuk dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini yang sejalan dengan SDGs.

Program pertama adalah *wash management of Batang Arau River*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air Sungai Batang Arau Padang dari level 4 menjadi level 2.¹⁴⁰ Sasaran dari program ini bertujuan untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Pemerintah Kota Padang mengambil peran dalam mencapai tujuan nomor 6 SDGs karena Kota Padang memiliki DAS yang tercemar. Melalui perkembangan globalisasi, Pemerintah Kota Padang dapat menemukan mitra kerja sama yang dapat memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kualitas air DAS Batang Arau Padang tersebut.

Program kedua yang disepakati dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini adalah bantuan dari Yayasan Hildesheim yang bernama *Hildesheimer Blinden Mission* yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus akan membantu pelajar tuna netra di Kota Padang dalam bentuk pelatihan tenaga guru/dosen, bantuan alat praga, dan buku-buku mata pelajaran yang menggunakan huruf *braille*.¹⁴¹ Bantuan tersebut merupakan implementasi Upaya Pemerintah Kota

¹⁴⁰ Minutes of Appraisal Mission, "Expert Support for Municipal Partnership Padang – Hildesheim," 2019.

¹⁴¹ Yulcherlina, et al, 105.

Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim dalam mencapai target 4.5 tujuan nomor 4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia berkewajiban untuk menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

2. Regionalisasi.

Dalam indikator regionalisasi ini, penulis tidak menemukan faktor regionalisasi sebagai penyebab terjadinya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Hal tersebut karena secara geografis, Kota Padang dan Kota Hildesheim tidak berada pada suatu kawasan yang berdekatan. Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Indonesia yang merupakan bagian dari kawasan ASEAN. Sedangkan Kota Hildesheim adalah kota yang berada di Negara Bagian Lower Saxony, Jerman yang merupakan bagian dari kawasan Uni Eropa. Kondisi yang jauh secara geografis tersebut tidak dapat menimbulkan regionalisasi atau pengelompokan suatu wilayah yang berdekatan dan memiliki sebagai suatu kawasan atas kesamaan faktor sejarah internal, ekonomi, politik, dan budaya sehingga faktor regionalisasi ini tidak dapat dijelaskan sebagai faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

3. Demokratisasi.

Dalam penelitian ini, faktor demokratisasi mengambil peran dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada

tahun 1988-2022. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Proses perubahan tersebut merupakan demokratisasi di Indonesia. Melalui proses demokratisasi tersebut, telah terdapat hukum yang mengatur secara jelas mengenai wewenang pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri. Dengan adanya penjelasan bidang-bidang kerja sama yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pemerintah daerah dalam paradiplomasi seperti yang diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memperluas fokus kerja samanya dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

4. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri.

Dalam penelitian ini, faktor domestikasi politik luar negeri yang berperan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah pengimplementasian kebijakan luar negeri pemerintah pusat Indonesia dalam mencapai SDGs. Paradiplomasi Padang-Hildesheim ini merupakan bentuk akselerasi atau percepatan dalam mencapai pembangunan nasional di Indonesia, terutama pada bidang lingkungan dan pendidikan.¹⁴² Pemerintah Kota Padang sebagai pemerintah daerah di Indonesia membantu pemerintah pusat Indonesia untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs dalam meningkatkan kualitas air di Indonesia melalui pembentukan program-program seperti perencanaan teknis dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Padang, kerja sama pengelolaan air minum PDAM, dan program

¹⁴² Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

Wash Management of Batang Arau River dengan Pemerintah Kota Hildesheim. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga berupaya untuk mencapai tujuan nomor 4 SDGs dengan membentuk berbagai program kerja sama dengan Pemerintah Kota Hildesheim seperti *Engineering for Indonesia*, bantuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan tuna netra di Kota Padang.

Faktor internal Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Desentralisasi.

Adanya pemberian otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang disebut juga dengan desentralisasi dapat mendorong terbentuknya paradiplomasi.¹⁴³ Di Indonesia, pemerintah pusat memberikan otoritas atau wewenang kepada pemerintah daerahnya tidak hanya dalam mengurus urusan dalam negeri melainkan juga diberi wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri. Dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat Indonesia telah mengatur dengan jelas bidang-bidang hubungan luar negeri yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Pemerintah pusat Indonesia menetapkan bahwa kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia merupakan hal yang krusial dalam politik luar negeri

¹⁴³ Alexander S. Kuznetsov, 105.

Indonesia.¹⁴⁴ Hal tersebut menjadikan pemerintah pusat Indonesia memberikan otoritas kepada pemerintah daerahnya untuk mencapai kepentingan nasional melalui diplomasi luar negeri. Pemerintah Indonesia juga meyakini bahwa keberhasilan politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kondisi dalam negeri sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mencari peluang ekonomi melalui hubungan luar negeri seperti kerja sama *sister city* dengan kepentingan untuk memajukan perekonomian daerah dan tentunya mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.¹⁴⁵

Pemerintah subnasional atau pemerintah daerah Indonesia mendapatkan otoritas atau wewenang untuk melakukan kerja sama luar negeri pada berbagai bidang, seperti penanaman modal asing, kegiatan ekspor impor, kerja sama pariwisata, pendidikan, budaya, dan bidang lainnya yang menyangkut pembangunan.¹⁴⁶ Walaupun diberikan wewenang dengan bidang kerja sama luar negeri yang sangat luas, tetapi masih terdapat batasan bidang kerja sama luar negeri yang dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi persoalan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, moneter dan fiskal nasional, dan yustisi.¹⁴⁷ Wewenang yang diberikan pemerintah pusat juga bertujuan agar pemerintah daerah Indonesia mampu mencapai kepentingan nasional Indonesia. Pembentukan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah Indonesia berada dibawah

¹⁴⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Renstra Kemenlu 2015-2019," terakhir dimodifikasi 2015, diakses 16 Juni 2023, http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/ENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf

¹⁴⁵ Andrini Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi," *Politica* 7 (1), 2016.

¹⁴⁶ Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)," *Jurnal Hukum* 16 (2), 2009.

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10, Ayat 3.

koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Adanya wewenang yang diberikan pemerintah pusat Indonesia untuk melakukan kerja sama luar negeri dan pembagian bidang kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri secara jelas, mendorong salah satu pemerintah daerah di Indonesia, yaitu Pemerintah Kota Padang untuk memanfaatkan wewenang tersebut dengan mempertahankan paradiplomasi dengan Kota Hildesheim, Jerman. Paradiplomasi yang dijalin oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan desentralisasi atau pemberian otoritas kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim selama 34 tahun yang tidak melanggar batasan-batasan bidang kerja sama luar negeri yang dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana program-program dalam kerja sama *sister city* kedua kota ini meliputi bidang pendidikan, olahraga, kesenian dan budaya, pertanian, lingkungan, bantuan kemanusiaan, dan pertukaran informasi.

Selain disebabkan karena adanya otoritas dari pemerintah pusat Indonesia kepada pemerintah daerah untuk melakukan paradiplomasi, paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini juga dapat berlangsung selama 34 tahun karena adanya dukungan langsung dari pemerintah pusat Indonesia yang diwakilkan oleh Konjen RI di Hamburg.¹⁴⁸ Hal ini dapat dilihat dari dukungan dalam bentuk

¹⁴⁸ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

mendampingi kegiatan dan ikut mendukung kegiatan pameran dan memberikan tempat setiap adanya kegiatan kunjungan Pemerintah Kota Padang.¹⁴⁹ Dalam kegiatan promosi terpadu Indonesia dalam *Information Evening sister city* Padang-Hildesheim, Konjen RI Hamburg juga ikut mempromosikan Kota Padang sebagai salah satu kota metropolitan besar di Indonesia yang semakin berkembang sehingga KJRI Hamburg akan memfasilitasi kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim yang akan meningkatkan *people to people contact* kedua negara ini.¹⁵⁰ Tidak hanya KJRI Hamburg, KBRI Berlin juga ikut mengisi acara *Indonesian Evening* di Hildesheim dalam rangka evaluasi 30 tahun hubungan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dengan menyediakan kuliner Indonesia.¹⁵¹ Hal tersebut membuktikan bahwa faktor desentralisasi mengambil peran dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim selama 34 tahun ini.

2. Masalah dengan proses pembangunan bangsa.

Paradiplomasi merupakan peluang yang besar bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional dan menyelesaikan permasalahan pembangunan bangsanya.¹⁵² Pada tahun 1958 hingga 1961 terjadi peristiwa pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Adanya peristiwa pergolakan PRRI ini menjadikan kondisi Indonesia mengalami keterpurukan sehingga pemerintah di Indonesia harus melakukan pembangunan bangsa kembali. Hal ini juga terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Menanggapi kondisi keterpurukan Kota Padang akibat pergolakan PRRI

¹⁴⁹ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁵⁰ Yulcherlina, et al, 69.

¹⁵¹ Yulcherlina, et al, 107, 108.

¹⁵² Alexander S. Kuznetsov, 105.

ini, Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional Indonesia ikut mengambil langkah untuk membantu pemerintah pusat Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional yaitu membangun kembali bangsa Indonesia yang telah terpuruk akibat peristiwa pergolakan PRRI. Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk membantu proses pembangunan bangsa kembali adalah melakukan kerja sama luar negeri. Hal tersebut karena paradiplomasi diyakini dapat memberikan peluang bagi pemerintah pusat dalam memecahkan permasalahan bangsa melalui bantuan pemerintah subnasional.¹⁵³ Dengan demikian, melalui bantuan Gubernur Sumatera Barat pada saat itu, Pemerintah Kota Padang membentuk paradiplomasi dengan Kota Hildesheim untuk dapat membantu pemerintah pusat agar wilayah di Indonesia dapat keluar dari keterpurukan sehingga dapat mencapai pembangunan nasional.

Selain itu, masalah dengan proses pembangunan bangsa lainnya yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berorientasi dengan pemanfaatan SDA dan lingkungan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.¹⁵⁴ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki banyak masalah dengan proses pembangunan bangsa dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumber daya air. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Indonesia belum mampu mencapai target 6.3 tujuan nomor 6 SDGs yang menjelaskan bahwa:

¹⁵³ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 105.

¹⁵⁴ A Frinaldi, et al, "Good Environmental Governance Model in Domestic Waste Management in Batang Arau, West Sumatera," *IOP Publishing*, 2022.

“Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.”

Studi pembuangan sampah yang dicatat oleh *World Bank* pada tahun 2021 menjelaskan bahwa catatan sampah dari 500 kota dan 34 provinsi di Indonesia menghasilkan 7,8 ton sampah setiap tahunnya, dengan 4,9 juta ton sampah plastik tidak dikelola dengan baik sehingga mengalir ke berbagai saluran drainase dan berujung pada Daerah Aliran Sungai (DAS).¹⁵⁵ Salah satu DAS di Indonesia yang telah tercemar adalah DAS Batang Arau yang berada di Kota Padang. Masalah tersebut mengambil peran yang kuat dalam berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini. Hal tersebut karena Pemerintah Kota Padang sebagai pemerintah subnasional Indonesia tentunya harus mengambil peran dalam membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia ini dengan cara memperbaiki kualitas air di DAS Batang Arau, Padang. Kepentingan Pemerintah Kota Padang tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kota Hildesheim dimana kedua kota menyepakati pemberian bantuan dalam program *wash management of Batang Arau River*. Bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam program *wash management of Batang Arau River* ini merupakan bentuk implementasi kepatuhan Pemerintah Hildesheim terhadap politik luar negeri Jerman pada program *Engagement Global*. Dalam program tersebut dijelaskan bahwa pemerintah federal Jerman akan memberikan bantuan pembangunan bagi mitra kerja sama kotanya untuk menyelesaikan permasalahan

¹⁵⁵ Irvan Renaldi dan Aldri Frinaldi, “Implementation of Batang Arau Watershed Management with Good Environmental Governance Perspective,” *Jurnal Bina Praja* 14 (2), 2022.

global.¹⁵⁶ Salah satu bentuk bantuan yang akan diberikan pemerintah federal Jerman adalah dengan memfasilitasi tenaga ahli.¹⁵⁷

3. Kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri.

Lemahnya pemerintah pusat dalam mengelola politik luar negeri yang efektif mendorong pemerintah subnasional untuk mengambil peran dalam hubungan luar negeri. Pada umumnya, paradiplomasi yang dilakukan pemerintah subnasional terkait isu perubahan iklim global disebabkan oleh kegagalan kemauan politik pemerintah pusat dalam mengatasi isu ekologis ini.¹⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan data, baik data sekunder maupun data primer dari wawancara 2 pihak dari Kota Padang yang terlibat dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini yang menjelaskan mengenai keterkaitan faktor kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri sebagai faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini. Selain itu, penulis juga tidak menemukan data yang menjelaskan bahwa faktor kegagalan kemauan politik pemerintah pusat Indonesia dalam mengatasi isu ekologis ataupun isu global lainnya dalam mendorong Pemerintah Kota Padang untuk membentuk paradiplomasi dengan Pemerintah Kota Hildesheim.

4. Asimetri unit penyusun.

Adanya kekuatan besar potensi unggulan daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi unggulannya tersebut ke arena

¹⁵⁶ Engagement Global: About Us, diakses 13 Agustus 2023, <https://skew.engagement-global.de/about-us.html>

¹⁵⁷ Declaration of Interest by Municipal Partnership Wishing to Participate in the Program: experts for Municipal Partnership Worldwide, 2019.

¹⁵⁸ Alexander S. Kuznetsov, 106.

internasional.¹⁵⁹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi unggulan daerah tersebut ke arena internasional adalah melalui paradiplomasi. Dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim, yang menjadi faktor asimetri unit penyusun sehingga dapat menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim selama 34 tahun adalah adalah potensi unggulan kebudayaan yang dimiliki Kota Padang. Pemerintah Kota Padang berhasil memperkenalkan kebudayaan Minang seperti tarian adat dan kuliner Minangkabau di kalangan masyarakat Hildesheim dan masyarakat internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari dimintanya Tim Kesenian Padang untuk tampil dalam dalam acara-acara seperti Muhibah Delegasi Budaya dan Pariwisata Sumatera Barat dan *Information Evening Sister City Padang-Hildesheim*. Melalui kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini diharapkan Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional di Indonesia dapat membantu pemerintah pusat dalam mencapai kepentingan nasional di bidang sosial budaya yaitu untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia ke dunia internasional melalui kerja sama luar negeri dan mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat memaksimalkan pembangunan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.¹⁶⁰ Dengan demikian, faktor asimetri unit penyusun menjadi pelengkap dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim pada tahun 1988-2022.

¹⁵⁹ Alexander S. Kuznetsov, 106.

¹⁶⁰ Andriani Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi," *Politica* 7 (1), 2016.

5. Stimulus luar.

Adanya stimulus eksternal dapat memberikan peluang besar bagi daerah atau negara bagian dalam mencapai kepentingan yang lebih besar dari kepentingan nasional dengan melawati batas-batas nasional.¹⁶¹ Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, faktor yang dapat dikategorikan sebagai stimulus luar penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 ini adalah kontak pribadi antara orang-orang dari kedua belah pihak, yang mana dalam kerja sama *sister city* ini yaitu Admi Landri Schlüter. Admi Landri Schlüter (Mimi) merupakan orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman yang merupakan mahasiswa delegasi *HAWK University Hildesheim* yang bernama Roland Schlüter.¹⁶² Oliver Rösner, penanggung jawab kerja sama internasional Kota Hildesheim menjelaskan bahwa faktor utama pendorong dan penggerak kerja sama ini diluar administrasi kedua kota adalah kontak pribadi antara Mimi dan Roland Schlüter.¹⁶³ Roland dan Mimi ini memberi peran penting dalam pembentukan dan penggerakan kerja sama kedua kota ini karena ia memiliki kontak yang baik dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini sehingga ia berperan sebagai jembatan dalam pembentukan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini.¹⁶⁴ Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, Roland dan Mimi mengambil peran dalam menghubungkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerja sama ini dan menginformasikan program-program dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.¹⁶⁵ Dengan demikian, faktor stimulus luar

¹⁶¹ Alexander S. Kuznetsov, 107.

¹⁶² Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁶³ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁶⁴ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁶⁵ Yulcherlina, wawancara oleh penulis, zoom, 10 Agustus 2023.

dikategorikan dalam skala lemah dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim karena peran kedua pihak diluar administrasi dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini cukup penting dalam berkembangnya paradiplomasi ini karena membantu menghubungkan komunikasi kedua kota. Selanjutnya, faktor stimulus luar lainnya yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim adalah masih adanya dukungan yang kuat dari mantan pemimpin daerah Kota Padang dalam mendorong perkembangan kerja sama ini.¹⁶⁶ Bapak Syahrul Ujud, Walikota Padang yang menjabat pada tahun awal pembentukan paradiplomasi Padang-Hildesheim ini masih sering ikut terlibat dalam kegiatan paradiplomasi ini walaupun sudah tidak menjabat sebagai Walikota Padang. Selain itu, adanya dukungan dari *stakeholder* lain seperti pihak Universitas Bung Hatta juga mendorong berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini.¹⁶⁷

6. Peran pemimpin daerah.

Pemimpin daerah memiliki peran penting dalam menentukan intensitas dan arah keterlibatan entitas subnasional dalam urusan internasional.¹⁶⁸ Dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini, pemimpin daerah di Sumatera Barat yang berperan sebagai pemerintah subnasional di Indonesia mengambil peran yang sangat besar dimana saat Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin oleh Bapak Harun Zain, memiliki saudara yang pada saat itu menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jerman Barat. Melalui hubungan persaudaraan pemimpin daerah Sumatera Barat tersebut hubungan kerja sama salah satu kota di Sumatera

¹⁶⁶ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁶⁷ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁶⁸ Alexander S. Kuznetsov, 107.

Barat yaitu Kota Padang dan salah satu kota di Jerman Barat yaitu Kota Hildesheim mulai diinisiasi.¹⁶⁹

Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang menjelaskan bahwa berkembangnya kerja sama sister city Padang-Hildesheim ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah Kota Padang dalam menindak lanjuti kerjasama-kerjasama yang telah disepakati terdahulu.¹⁷⁰ Bentuk implementasi komitmen pemerintah daerah Kota Padang ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh pemeimpin daerah di Kota Padang ke Hildesheim seperti kunjungan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi ke Hildesheim pada tanggal 10 Februari 2012, kunjungan Wakil Walikota Padang Emzalmi dalam rangka penguatan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim pada tanggal 19 hingga 22 Juni 2015, kunjungan Sekretaris Daerah Kota Padang Ir. Asnel, M.Si dan delegasi ke Kota Hildesheim pada tanggal 14 hingga 22 Juni 2017, dan kunjungan delegasi Kota Padang yang diwakili oleh Asisten Sekretariat Daerah Kota Padang pada tanggal 3 hingga 10 Maret 2018. Selain itu, bentuk implementasi komitmen pemimpin daerah di Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini selama 34 tahun juga dapat dilihat aktifnya pemimpin daerah di Kota Padang dalam menghadiri acara-acara penting seperti peringatan 25 tahun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dan promosi terpadu Indonesia dalam *Information Evening sister city* Padang-Hildesheim.

¹⁶⁹ Yulcherlina, et al, 1.

¹⁷⁰ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

7. Peran perbatasan.

Kuznetsov menjelaskan bahwa kondisi geografis yang berdekatan menjadikan negara-negara memilih untuk melakukan paradiplomasi dengan tujuan saling mencapai kepentingan satu sama lain. Misi utama dari peran perbatasan dalam pembentukan paradiplomasi ini adalah dengan menyatukan tetangga asing maka dapat mengubah kedekatan geografis sebagai peluang untuk saling menguntungkan.¹⁷¹ Dalam penelitian ini, faktor peran perbatasan tidak mengambil peran dalam menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini. Hal tersebut karena secara geografis, Kota Padang dan Kota Hildesheim tidak berdekatan karena kedua kota ini terletak pada benua yang berbeda, dimana Kota Padang terletak di Benua Asia dan Kota Hildesheim terletak di benua Eropa.

4.2 Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Hildesheim

Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini tentunya juga dapat berkembang selama 34 tahun karena beberapa faktor dari Kota Hildesheim. Dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini, penulis menemukan beberapa faktor dari perspektif Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* Kota Padang dan Kota Hildesheim tersebut.

¹⁷¹ Alexander S. Kuznetsov, 108.

Faktor eksternal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Globalisasi.

Adanya fenomena globalisasi menjadikan menipisnya batas-batas antar negara sehingga memberikan kesempatan kepada entitas subnasional untuk mencapai kepentingan nasional dan kepentingan daerahnya melalui kerja sama lintas batas negara. Berkembangnya fenomena globalisasi juga menyebabkan pergeseran fokus negara dari *high political issues* menjadi *low political issues*. Melalui perkembangan globalisasi, negara-negara di dunia dapat melakukan perundingan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu politik rendah tersebut. Dengan demikian, timbul kesepakatan agenda 2030 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh negara di dunia. Adanya kewajiban negara-negara untuk mencapai SDGs menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberlangsungan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini. Dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, Pemerintah Kota Hildesheim yang berperan sebagai pemerintah subnasional Jerman ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs melalui program bantuan kepada Kota Padang. Dalam program *wash management of Batang Arau River* yang bertujuan untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs, pemerintah federal Jerman melalui Pemerintah Kota Hildesheim mengirimkan tenaga ahli hidrologi ke Kota Padang untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan kualitas air sungai di DAS Batang Arau tersebut. Pemerintah Kota Hildesheim mengambil peran dalam pencapaian tujuan nomor 6 SDGs tersebut

karena Kota Hildesheim merupakan kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat maju dan sudah mulai dikelola pada tahun 1994.¹⁷² Pengelolaan sampah terpilah di Hildesheim ditangani oleh badan yang bernama *Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim* (ZAH).¹⁷³ Selain itu, untuk mencapai tujuan nomor 4 SDGs di Kota Padang, Pemerintah Kota Hildesheim juga memberikan bantuan melalui Yayasan Hildesheim yang bernama *Hildesheimer Blinden Mission* yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus akan membantu pelajar tuna netra di Kota Padang dalam bentuk pelatihan tenaga guru/dosen, bantuan alat praga, dan buku-buku mata pelajaran yang menggunakan huruf *braille*.¹⁷⁴ Bantuan-bantuan tersebut merupakan bentuk implementasi upaya pemerintah federal Jerman dalam menyelesaikan isu-isu politik rendah dan mencapai SDGs secara *global*.

2. Regionalisasi.

Dalam indikator regionalisasi ini, penulis tidak menemukan faktor regionalisasi sebagai penyebab terjadinya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Hal tersebut karena secara geografis, Kota Padang dan Kota Hildesheim tidak berada pada suatu kawasan yang berdekatan. Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Indonesia yang merupakan bagian dari kawasan ASEAN. Sedangkan Kota Hildesheim adalah kota yang berada di Negara Bagian Lower Saxony, Jerman yang merupakan bagian dari kawasan Uni Eropa. Kondisi yang jauh secara geografis tersebut tidak dapat menimbulkan regionalisasi atau pengelompokkan suatu wilayah yang berdekatan dan memiliki

¹⁷² Michell Rohman, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli 2023.

¹⁷³ Yulcherlina, et al, 31.

¹⁷⁴ Yulcherlina, et al, 105.

sebagai suatu kawasan atas kesamaan faktor sejarah internal, ekonomi, politik, dan budaya sehingga faktor regionalisasi ini tidak dapat dijelaskan sebagai faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.

3. Demokratisasi.

Dalam penelitian ini, faktor demokratisasi tidak dapat dikategorikan sebagai faktor yang berpengaruh dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Hildesheim. Hal tersebut karena Jerman merupakan negara dengan demokrasi sejak lama dan tidak terdapat proses demokratisasi saat berlangsungnya aktivitas paradiplomasi ini.

4. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri.

Dalam penelitian ini, faktor domestikasi politik luar negeri dapat dikategorikan sebagai penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Hal tersebut karena dalam Resolusi Perdana Menteri Jerman tahun 1962-1988 dijelaskan mengenai mengenai pembagian wewenang pemerintah negara bagian dan pemerintah subnasional Jerman lainnya secara jelas dalam melakukan kerja sama luar negeri. Dalam resolusi tersebut dijelaskan bahwa prioritas kerja sama luar negeri negara bagian adalah promosi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para spesialis atau tenaga ahli.¹⁷⁵ Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman memperjelas bahwa

¹⁷⁵ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.¹⁷⁶ Adanya kebijakan luar negeri Jerman tersebut mendorong Pemerintah Kota Hildesheim ikut mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan aktivitas paradiplomasi dengan salah satu pemerintah daerah di negara berkembang, yaitu Pemerintah Kota Padang, Indonesia. Dalam aktivitas paradiplomasi tersebut, Pemerintah Hildesheim memberikan bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap Kota Padang, seperti bantuan beasiswa *Engineering for Indonesia*, bantuan dana pembangunan GOR Haji Agus Salim Padang, bantuan peningkatan kualitas air di Kota Padang, dan lainnya.

Sedangkan faktor internal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Federalisasi.

Di Jerman, pemerintah federal memberikan wewenang kepada pemerintah negara bagiannya untuk melakukan hubungan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi dasar Jerman, pemerintah pusat Jerman telah menjelaskan terkait wewenang pemerintah negara bagian untuk dapat terlibat dalam kerja sama luar negeri seperti kerja sama *sister city* secara jelas yaitu dalam Pasal 32 Undang-

¹⁷⁶ Michèle Knodt, “Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder.”

Undang Dasar Republik Federal Jerman.¹⁷⁷ Dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman ikut bertanggung jawab dalam menjaga hubungan luar negeri.¹⁷⁸ Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman juga dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman dapat membentuk perjanjian dengan negara asing dengan ketentuan harus disetujui pemerintah pusat Jerman.¹⁷⁹

Salah satu bentuk kegiatan paradiplomasi yang menjadi bagian dari kerja sama pembangunan negara Jerman adalah kerja sama *sister city*.¹⁸⁰ Kerja sama *sister city* negara Jerman berjalan seiringan dengan kebijakan luar negeri negara federal yang berbentuk seperti kerja sama lintas batas dan antar daerah, pembangunan ekonomi regional, kebijakan pembangunan, kebijakan budaya dan pendidikan, dan juga kebijakan suaka dan migrasi. Paradiplomasi Jerman didasarkan pada wawasan tentang keuntungan dari kontrol federalisasi dan kebutuhan terhadap solusi dari masalah lintas batas dan penggabungan bidang kekuatan dan keunggulan untuk menciptakan efek sinergi. Kerja sama *sister city* Jerman mencakup bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi negara federal, yaitu urusan sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan lingkungan.¹⁸¹

Adanya dorongan yang diberikan pemerintah federal Jerman untuk melakukan kerja sama luar negeri, menjadikan pemerintah negara bagian Jerman ikut mendorong pemerintah kotanya untuk melakukan paradiplomasi. Salah satu

¹⁷⁷ Anna-Lena Kirch, et al, "Municipal Foreign Policy," DGAP MEMO, 2021.

¹⁷⁸ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 32, Absatz 1.

¹⁷⁹ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 32, Absatz 3.

¹⁸⁰ Michell Rohman, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli 2023.

¹⁸¹ Michèle Knodt, "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder," diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

bentuk paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di Jerman adalah kerja sama *sister city* Kota Hildesheim dengan Kota Padang, Indonesia yang dibentuk pada tahun 1988. Adanya dukungan penuh dari pemerintah federal Jerman dalam kerja sama kotanya menjadikan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* ini dapat aktif dan berlangsung selama 34 tahun. Kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini juga sesuai dengan bidang-bidang yang diatur dalam kompetensi negara federal dimana kerja sama ini mencakup bidang pendidikan dan budaya.

2. Masalah dengan proses pembangunan bangsa.

Dalam penelitian ini, tidak terdapat faktor masalah dengan proses pembangunan bangsa Jerman sebagai faktor yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini. Hal tersebut karena Jerman tidak memiliki permasalahan bangsa yang signifikan dan berpengaruh dalam paradiplomasi ini.

3. Kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri.

Dalam penelitian ini, tidak terdapat faktor kurang efektifnya pemerintah pusat Jerman dalam hubungan luar negeri sebagai faktor yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini. Hal tersebut karena dapat dilihat dari aktifnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat Jerman dalam hubungan luar negerinya seperti bantuan dana sebesar 7000 euro untuk Kota Padang pasca gempa 2009 di Kota Padang.¹⁸² Pemerintah pusat Jerman yang telah menambahkan dana yang disediakan untuk kerja sama pembangunan luar negeri hingga tahun 2019 yaitu sebesar 8,3 miliar Euro. Dalam pemberian dana bantuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat Jerman menetapkan Kementerian Federal

¹⁸² Yulcherlina, et al, 56.

Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan luar negeri diserahkan kepada perwakilan Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Grup Bank KfW yang diutus di masing-masing negara yang bersangkutan.¹⁸³

4. Asimetri unit penyusun.

Potensi unggulan budaya yang dimiliki Kota Hildesheim sebagai kota warisan budaya yang diakui UNESCO dengan wisata bangunan bersejarahnya menjadi faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Hildesheim dalam memaksimalkan potensi tersebut adalah dengan tetap mempertahankan paradiplomasinya dengan Pemerintah Kota Padang, Indonesia yang juga memiliki kesamaan potensi unggulan budaya di wisata bangunan bersejarahnya. Paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* ini berfokus pada bidang kebudayaan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional Jerman yaitu untuk menyebarluaskan Bahasa Jerman di panggung internasional, memperkenalkan Jerman sebagai negara dengan budaya yang beragam dan sukses, dan ingin menampilkan citra Jerman sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.¹⁸⁴ Selain itu, fokus kerja sama ini pada bidang kebudayaan juga bertujuan untuk mencapai kepentingan subnasional yang sama antara Kota Hildesheim dan Kota Padang yaitu ingin

¹⁸³ Bobby Hermanda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang – Hildesheim."

¹⁸⁴ Bobby Hermanda, "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama *Sister City* Padang - Hildesheim," *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.

memperkenalkan kebudayaan antar kota dan saling mempelajari dan berbagi informasi terkait pemeliharaan wisata bangunan bersejarah kedua kota ini.¹⁸⁵

Selain potensi unggulan wisata bangunan bersejarah, paradiplomasi Kota Padang dengan Kota Hildesheim ini juga terbentuk karena potensi unggulan Kota Hildesheim yang maju dalam bidang teknologi dan industri sehingga hal ini menjadikan Pemerintah Kota Padang tertarik untuk mempertahankan kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim.¹⁸⁶ Pemerintah Kota Hildesheim memanfaatkan potensi unggulannya tersebut dalam pertukaran informasi dan pemberian bantuan ke Kota Padang seperti pembuatan *master plan* TPA Air Dingin, membantu Teknik penjernihan air PDAM di Padang, membantu dalam teknologi pertanian melalui program Bina Masyarakat (Bimas) di Padang, dan membantu dalam peningkatan kualitas DAS Batang Arau.¹⁸⁷ Dengan demikian, faktor asimetri unit penyusun dapat dikategorikan cukup penting dalam penyebab berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini.

5. Stimulus luar.

Adanya stimulus eksternal dapat memberikan peluang besar bagi daerah atau negara bagian dalam mencapai kepentingan yang lebih besar dari kepentingan nasional dengan melawati batas-batas nasional.¹⁸⁸ Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, faktor yang dapat dikategorikan sebagai stimulus luar penyebab berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini adalah kontak pribadi antara orang-orang dari kedua belah pihak, yang mana dalam kerja sama

¹⁸⁵ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁸⁶ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁸⁷ Erwin, M, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Juni 2023.

¹⁸⁸ Alexander S. Kuznetsov, 107.

sister city ini yaitu Admi Landri Schlüter. Admi Landri Schlüter (Mimi) merupakan orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman yang merupakan mahasiswa delegasi *HAWK University Hildesheim* yang bernama Roland Schlüter.¹⁸⁹ Oliver Rösner, penanggung jawab kerja sama internasional Kota Hildesheim menjelaskan bahwa faktor utama pendorong dan penggerak kerja sama ini diluar administrasi kedua kota adalah kontak pribadi antara Mimi dan Roland Schlüter.¹⁹⁰ Roland dan Mimi ini memberi peran penting dalam pembentukan dan penggerakan kerja sama kedua kota ini karena ia memiliki kontak yang baik dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini sehingga ia berperan sebagai jembatan dalam pembentukan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini.¹⁹¹ Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, Roland dan Mimi mengambil peran dalam menghubungkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerja sama ini dan menginformasikan program-program dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim.¹⁹²

Selain peran kontak pribadi orang-orang di kedua kota ini, stimulus luar yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini adalah adanya SDGs. SDGs mendorong pemerintah negara maju di dunia untuk bertanggung jawab dalam membantu negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Jerman sebagai negara maju ikut mengambil peran dalam memberikan bantuan pembangunan dengan membentuk *Engagement Global* sebagai bentuk

¹⁸⁹ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁹⁰ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁹¹ Oliver Rösner, wawancara oleh penulis, email, 11 Juli 2023.

¹⁹² Yulcherlina, wawancara oleh penulis, zoom, 10 Agustus 2023.

implementasi tujuan nomor 17 SDGs yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.¹⁹³ Dalam *Engagement Global* ini dijelaskan bahwa Jerman berkomitmen untuk memperkuat dan memfasilitasi mitra kerja sama kotanya dan negara-negara *global south* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.¹⁹⁴ Pemerintah pusat Jerman memberikan bantuan dana dalam proyek pembangunan mitra kerja sama kotanya melalui BMZ dan bantuan tenaga ahli melalui GIZ.¹⁹⁵ Komitmen Jerman tersebut diimplementasikan dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini dimana dapat dilihat dari banyaknya bantuan dana dan tenaga ahli, serta bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah Kota Hildesheim ke Kota Padang, seperti bantuan di bidang pertanian dalam bentuk program Bina Masyarakat, bantuan dalam perencanaan teknis dan pengelolaan TPA Air Dingin Padang, bantuan Teknik penjernihan air PDAM, bantuan dana pasca gempa 2009 Padang, bantuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan tuna netra di Padang, dan bantuan tenaga ahli hidrologi untuk DAS Batang Arau.

6. Peran partai politik.

Kuznetsov menjelaskan bahwa ideologi partai politik tertentu dapat menentukan intensitas dan arah keterlibatan entitas subnasional dalam hubungan internasional.¹⁹⁶ Jerman merupakan negara federal yang memberikan kebebasan terhadap pemerintah negara bagiannya untuk melakukan hubungan luar negeri. Perdana Menteri Jerman dari tahun 1962 hingga 1988 telah membuat resolusi yang mengatur mengenai pembagian wewenang pemerintah negara bagian dan

¹⁹³ Michell Rohman, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli, 2023.

¹⁹⁴ Engagement Global: About Us, diakses 23 Agustus 2023, <https://skew.engagement-global.de/about-us.html>

¹⁹⁵ Michell Rohman, wawancara oleh penulis, email, 25 Juli 2023.

¹⁹⁶ Alexander S. Kuznetsov, 107.

pemerintah subnasional Jerman lainnya dalam melakukan kerja sama luar negeri. Dalam resolusi tersebut dijelaskan bahwa prioritas kerja sama luar negeri negara bagian adalah promosi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para spesialis atau tenaga ahli.¹⁹⁷ Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.¹⁹⁸ Adanya resolusi dari Perdana Menteri Jerman tersebut membuktikan bahwa partai politik mengambil peran dalam penyebab suatu paradiplomasi terjadi.

Menanggapi peraturan dari Perdana Menteri Jerman tersebut, Pemerintah Kota Hildesheim, Jerman dibawah pengawasan Pemerintah Negara Bagian Lower Saxony, Jerman ikut mengambil peran dalam bantuan pembangunan luar negeri di bidang pendidikan dimana hal ini dibuktikan dari fokus utama kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim adalah bidang pendidikan. Bentuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam kerja sama ini adalah pengiriman tenaga ahli ke Kota Padang dan membuat program *Engineering for Indonesia* (EFI) bagi pelajar Kota Padang yang didanai oleh Hildesheim.¹⁹⁹ Selain itu, Pemerintah Kota Hildesheim juga membukakan jalan bagi para pelajar Kota Padang untuk menuntut ilmu di *HAWK University Hildesheim*.²⁰⁰ Kepatuhan

¹⁹⁷ Michèle Knodt, “Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder,” diakses 3 Juni 2023, <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>

¹⁹⁸ Michèle Knodt, “Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder.”

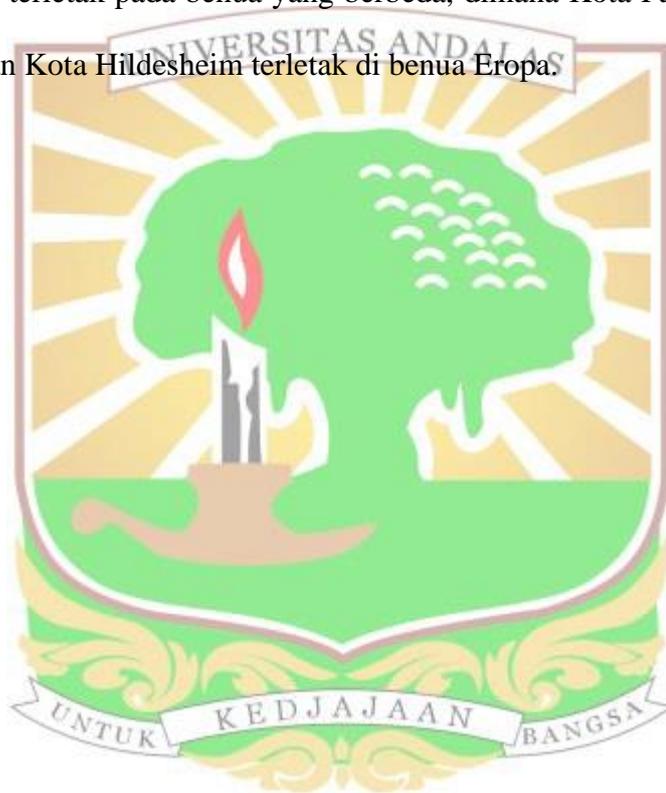
¹⁹⁹ Yulcherlina, et al, 47.

²⁰⁰ Yulcherlina, et al, 47.

Pemerintah Kota Hildesheim terhadap resolusi tersebut menjadi faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim dari tahun 1988 hingga 2022.

7. Peran perbatasan.

Dalam penelitian ini, faktor peran perbatasan tidak mengambil peran dalam menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini. Hal tersebut karena secara geografis, Kota Padang dan Kota Hildesheim tidak berdekatan karena kedua kota ini terletak pada benua yang berbeda, dimana Kota Padang terletak di Benua Asia dan Kota Hildesheim terletak di benua Eropa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Paradiplomasi yang dijalin oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dalam bentuk kerja sama *sister city* ini dinilai memiliki pola yang menarik karena tidak sejalan dengan ketentuan dibentuknya kerja sama *sister city* yaitu atas dasar kesamaan potensi unggulan daerah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perbedaan latar belakang antara Kota Padang dan Kota Hildesheim. Walaupun demikian, aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini dapat berkembang dari tahun 1988-2022 dan masih aktif hingga saat ini. Berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat diidentifikasi berdasarkan konsep paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov. Kuznetsov menjelaskan bahwa secara garis besar, dalam menjelaskan penyebab berkembangnya suatu aktivitas paradiplomasi dapat diidentifikasi berdasarkan 2 faktor, yaitu berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal.²⁰¹

Faktor eksternal Kota Padang yang ditemukan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi mendorong fokus negara terhadap isu-isu politik rendah sehingga menciptakan kesepakatan SDGs. Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim, Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah

²⁰¹ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 102.

subnasional Indonesia ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Kedua, demokratisasi. Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia menjadikan jelasnya aturan mengenai paradiplomasi sehingga Pemerintah Kota Padang dapat memperluas bidang kerja samanya dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim sesuai dengan hukum di Indonesia. Ketiga, domestikasi kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai SDGs juga diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang sehingga mendorong terbentuknya berbagai program sebagai implementasi SDGs dalam paradiplomasi ini.

Selanjutnya faktor internal Kota Padang yang ditemukan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, desentralisasi. Adanya pemberian otoritas kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan hubungan luar dapat dilihat dari Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, masalah dengan proses pembangunan bangsa. Adanya permasalahan kualitas air sungai di Indonesia membuat pemerintah subnasional juga harus ikut dalam penanganan masalah kualitas air sungai. Ketiga, asimetri unit penyusun. Adanya potensi unggulan di wisata bangunan bersejarah Kota Padang diharapkan dapat mencapai kepentingan nasional di bidang sosial budaya untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia ke dunia internasional. Keempat, stimulus luar. Melalui kontak yang baik antara Mimi dan Roland dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini menjembatani pembentukan dan pelaksanaan paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun ini. Adanya dukungan dari mantan pemimpin daerah Kota Padang dan pihak UBH juga menyebabkan berkembangnya paradiplomasi ini. Kelima, peran pemimpin

daerah. Adanya komitmen penuh pemimpin daerah di Kota Padang menyebabkan paradiplomasi Padang-Hildesheim ini dapat berkembang hingga tahun 2022.

Selanjutnya, dilihat dari perspektif Kota Hildesheim, faktor eksternal penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi mendorong fokus negara terhadap isu-isu politik rendah sehingga menciptakan kesepakatan SDGs. Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim, Pemerintah Kota Hildesheim yang berperan sebagai pemerintah subnasional Jerman ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Kedua, domestikasi kebijakan luar negeri. Adanya kebijakan luar negeri Jerman dalam memberikan bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan juga diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim.

Faktor internal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, federalisasi. Dalam konstitusi dasar Jerman, pemerintah Jerman telah menjelaskan terkait wewenang pemerintah negara bagian untuk dapat terlibat dalam kerja sama luar negeri seperti kerja sama *sister city* secara jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Kedua, asimetri unit penyusun. Potensi unggulan budaya yang dimiliki Kota Hildesheim sebagai kota warisan budaya yang diakui UNESCO dengan wisata bangunan bersejarahnya mendorong Pemerintah Kota Hildesheim untuk selalu memaksimalkan potensi tersebut ke arena internasional. Potensi unggulan Kota Hildesheim yang maju dalam bidang teknologi dan industri juga menjadikan

Pemerintah Kota Padang tertarik untuk mempertahankan kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim. Ketiga, stimulus luar. Melalui kontak yang baik antara Mimi dan Roland dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini menjembatani pembentukan dan pelaksanaan paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun ini. Selain peran kontak pribadi orang-orang di kedua kota ini, stimulus luar yang menyebabkan keberlangsungan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini adalah adanya SDGs. Keempat, peran partai politik. Resolusi Perdana Menteri Presiden Jerman tahun 1988 memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran dari penulis untuk Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan paradiplomasi kedepannya yaitu Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memaksimalkan paradiplomasi-paradiplomasi yang telah ada sesuai dengan pengimplementasian paradiplomasi berdasarkan kacamata hubungan internasional tanpa berfokus hanya pada kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrative Arrangement Between The Municipal Government of Padang, West Sumatera, Indonesia and The Municipal Government of Hildesheim, Lower Saxony, Federal Republic of Germany, "Concerning City Cooperation," 1988.
- Agreement on Results for assigning an integrated expert under the partnership between Hildesheim and Padang.
- Alam, Gilang Nur dan Arfin Sudirman. "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16 (1), 2020.
- Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5 (2), 2020.
- Alvarez, Mariano. "The Rise of Paradiplomacy in International Relations." *E-International Relations*, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. "Luas Daerah (km²), 2018 – 2021." Terakhir dimodifikasi 2021. Diakses 2 April 2023. <https://padangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-daerah.html>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2014.
- Declaration of Interest by Municipal Partnerships Wishing to Participate in the Program: experts for Municipal Partnerships Worldwide. 2019.
- Departemen Luar Negeri, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003), 16.
- Duchacek. "The International Dimension of Subnational Self Government." *Publius* 14 (4), 1984.
- Engagement Global: About Us. Diakses 13 Agustus 2023, <https://skew.engagement-global.de/about-us.html>
- Fahri, Mufidah. "Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City." *Digilib Unhas*, 2018.
- FAQs on the Experts for Municipal Partnerships Worldwide (FKPW) Programme. Diakses 24 Juli 2023. https://bv-hh.de/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGxQIiwiaXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn191f3b6e240b7babf0c16bf3d79d58e64252459830/Anlage2FAQ_FKPW_eng.pdf ?

- Frinaldi, A., et al. "Good Environmental Governance Model in Domestic Waste Management in Batang Arau, West Sumatera." *IOP Publishing*, 2022.
- G, Martel. "Paradiplomacy and Protodiplomacy." *WILEY*, 2018.
- Gusman, Delfina dan Zimtya Zora. "Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara)." *UIRLawReview* 5 (1), 2021.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art 32, Absatz 1.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art 32, Absatz 3.
- Hermanda, Bobby. "Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama Sister City Padang - Hildesheim." *Diploma Thesis Universitas Andalas*, 2016.
- Ibrahim, Haldzi Faturrohman. "Kerjasama Paradiplomasi Kota Bandung – Braunschweig di Dalam Bidang Pendidikan dan Kepemudaan." *Repository Unpas*, 2019.
- Isnarti, Rika dan Sofia Trisni. "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy." *AEGIS: Journal of International Relations* 4 (2), 2020.
- Isnarti, Rika dan Poppy Irawan. "West Sumatera Province's Readiness to Initiate Foreign Affairs." *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science* 7 (2), 2022.
- Jackson, Thomas. "Paradiplomacy and Political Geography: The Geopolitics of Substate Regional Diplomacy." *WILEY*, 2018.
- Jatmika, Sidik. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Republik Federal Jerman. "Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman." Diakses 8 Mei 2023. <https://www.kemlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Indonesia-Jerman Perkuat Hubungan Bilateral dan Momentum 70 Tahun Kerja Sama." Terakhir dimodifikasi 2022. Diakses 6 Juli 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4611/indonesia-jerman-perkuat-hubungan-bilateral-dalam-momentum-70-tahun-kerja-sama>.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Dorong Implementasi Kerjasama Sister City di Masa Pandemi; KJRI Hamburg Adakan Pertemuan Virtual dengan Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Padang." Terakhir dimodifikasi 2020. Diakses 2 April 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1548/berita/dorong-implementasi-kerjasama-sister-city-di-masa-pandemi-kjri-hamburg-adakan-pertemuan-virtual-dengan-pemerintah-kota-bandung-dan-pemerintah-kota-padang>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kerja Sama Bilateral." Terakhir dimodifikasi 2023. Diakses 29 Mei 2023, https://www.kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Renstra Kemenlu 2015-2019." Terakhir dimodifikasi 2015. Diakses 16 Juni 2023, http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/ENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf/
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Treaty Room." Terakhir dimodifikasi 2023. Diakses 29 Mei 2023, https://treaty.kemlu.go.id/aboutus/info/about_treaty_room.
- Kirch, Anna-Lena, et al. "Municipal Foreign Policy." *DGAP MEMO*, 2021.
- Knodt, Michèle. "Auswärtiges Handeln der Deutschen Länder." Diakses 8 Mei 2023. <https://www.degruyter.com/serial/dnap-b/html>.
- Kuznetsov, Alexander S. *Theory and Practice of Paradiplomacy; Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge, 2015.
- Lecours, Andre. "Paradiplomacy: Reflection on the Foreign Policy and International Relations of Regions." *International Negotiation* 7, 2002.
- Leffel, Benjamin dan Sohaela Amiri. "Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy." *Rising Power Quarterly* 3 (1), 2018.
- M, Erwin. Wawancara oleh penulis. Padang, 19 Juni 2023.
- Minutes of Meeting Between The Vice Mayor of The City of Padang and The Mayor of The City of Hildesheim On The Implementation of Sister City Cooperation Between Padang and Hildesheim. 2015.
- Pranajaya, Agra Sena. "Naskah Publikasi Kerjasama Sister City Padang Dengan Kota Vung Tau (2013-2016)." *Magister Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2017.
- Pujayanti, Adrini. "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi." *Politica* 7 (1), 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

- Ramadani, Molly. "Implementasi Stepping Up Strategic Partnership Indonesia-Jerman Tahun 2017-2021." *UMM Library*, 2022.
- Renaldi, Irvan dan Aldri Frinaldi. "Implementation of Batang Arau Watershed Management with Good Environmental Governance Perspective." *Jurnal Bina Praja* 14 (2), 2022.
- Rochman, Gina Puspitasari. "Pengelolaan Kota Melalui Jejaring *Sister City*: Kasus Studi Dari Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7 (2), 2019.
- Rohmann, Michell. Wawancara oleh penulis. Email, 25 Juli 2023.
- Rösner, Oliver. Wawancara oleh penulis. Email, 11 Juli 2023.
- Safitri, Nabila., et al. "Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (1), 2023.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Malang: Penerbit ANDI, 2010.
- Sompotan, Hendrik. "Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 3 (3), 2016.
- Stanzel, Volker. *Diplomatie für das 21. Jahrhundert. Sechs praktische Vorschläge*, (SWP Berlin: Deutsche Außenpolitik im Wandel, 2021), 13.
- Syafnidawaty. "Data Primer." *Universitas Raharja*. Terakhir dimodifikasi 2020. Diakses 11 Januari 2023. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.
- Syafnidawaty. "Data Sekunder." *Universitas Raharja*. Terakhir dimodifikasi 2020. Diakses 11 Januari 2023. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.
- Syarif, Nurul Alfath. "Hambatan Kerjasama *Sister City* Kota Padang Indonesia dan Kota Fremantle Australia." *JOM FISIP* 6 (II), 2019.
- The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin. "Perkuat Kerja Sama, Indonesia dan Jerman Resmikan Logo Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik." Terakhir dimodifikasi 2022. Diakses 6 Juli 2023, <https://indonesianembassy.de/news/perkuat-kerja-sama-indonesia-dan-jerman-resmikan-logo-peringatan-70-tahun-hubungan-diplomatik/>.
- The Millennia-Long History of German Sister Cities. Diakses 8 Mei 2023. <https://sistercities.org/2019/10/11/history-of-german-sister-cities/>.
- Thontowi, Jawahir. "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)." *Jurnal Hukum* 16 (2), 2009.

Titian, Putri. “Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Pemerintah Kota Padang Dengan Pemerintah Kota Hildesheim Pada Tahun 2012-2018.” *UMY Repository*, 2019.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11, Ayat 1-3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 10, Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 367, Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 367, Ayat 2.

Yulcherlina. Wawancara oleh penulis. Zoom, 10 Agustus 2023.

Yulcherlina., et al. *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*. Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang, 2018.



LAMPIRAN

Transkrip Wawancara 1

Pewawancara: Fella Fandwitania

Narasumber: M. Erwin, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Padang tertarik untuk menjalin paradiplomasi dengan Pemerintah Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim?

1) Adanya kemiripan antara Kota Padang dan Kota Hildesheim dari segi *heritage*. Kota Padang memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang masih dirawat hingga sekarang. Contohnya seperti gedung-gedung peninggalan Belanda di sepanjang daerah Kota Tua Padang. Sama halnya dengan Kota Padang, Pemerintah Kota Hildesheim juga mempertahankan *heritage* nya. Kota Hildesheim juga memiliki *world heritage* seperti Gereja St. Michael. Dengan kemiripan potensi tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang untuk belajar dari Kota Hildesheim dalam mempertahankan *heritage* nya.

2) Jerman merupakan negara maju di bidang teknologi dan pendidikan. Dari keunggulan Jerman di bidang teknologi dan pendidikan tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang tertarik menjalin kerja sama dengan Kota Hildesheim.

2. Apa saja kepentingan Kota Padang dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim?

Dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim, Pemerintah Kota Padang berharap dapat memajukan Kota Padang dalam berbagai hal, meliputi: teknologi pengelolaan lingkungan hidup, Pendidikan, pertukaran budaya, pertukaran informasi, dan pertukaran personal.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama bilateral Indonesia-Jerman. Setiap kegiatan kunjungan Pemerintah Kota Padang, Konjen RI di Hamburg selalu memberikan dukungan dalam bentuk mendampingi kegiatan dan ikut mendukung kegiatan pameran dan memberikan tempat.

Kerja sama ini merupakan akselerasi atau percepatan dalam mencapai pembangunan nasional di bidang lingkungan melalui program Wash Management of Batang Arau River dan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

3. Apakah kepentingan-kepentingan Kota Padang telah tercapai dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun ini?

Ya, terdapat banyak kepentingan Kota Padang yang telah tercapai selama 34 tahun ini, meliputi :

- 1) Bidang pendidikan; beasiswa untuk siswa SMK di Kota Padang.
- 2) Bidang kemanusiaan; Pemerintah Jerman melalui Pemerintah Kota Hildesheim memberikan bantuan kemanusiaan pasca gempa 2009.

- 3) Bidang lingkungan; adanya tenaga ahli Jerman yang membantu dalam pembuatan master plan di TPA Aia Dingin. Selain itu, tenaga ahli Jerman juga membantu dalam Teknik penjernihan air PDAM di Padang. Tenaga ahli Jerman juga membantu dalam meningkatkan kualitas air di Sungai Batang Arau.
 - 4) Bidang pertanian; adanya tenaga ahli Jerman yang membantu dalam teknologi pertanian.
4. Mengapa Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk mengembangkan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim selama 34 tahun?
- 1) Banyaknya kepentingan Kota Padang yang tercapai dalam kerja sama ini.
 - 2) Pemerintah Hildesheim juga masih berkomitmen dalam menjalankan kerja sama ini.
 - 3) Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam kerja sama ini.
 - 4) Mantan pemimpin daerah Kota Padang juga masih mendorong keberlangsungan kerja sama ini.
 - 5) Adanya dukungan dari stakeholder lain ; UBH yang aktif terlibat dalam memberikan dukungan kerja sama ini.
 - 6) Adanya komitmen pemimpin daerah di Kota Padang dalam menjalankan kerja sama ini melalui orientasi visi misi yang ingin menindak lanjuti kerja sama yang telah disepakati.

Transkrip Wawancara 2

Pewawancara: Fella Fandwitania

Narasumber: Oliver Rösner, Penanggung Jawab Kerja Sama Internasional Kota Hildesheim

1. What are the factors that cause the City Government of Hildesheim interested in establishing sister city partnership with Padang City?

1) In the beginning 1980s the Bung Hatta University Padang and HAWK University of applied sciences and arts of had a good contact with a student exchange in the topic of construction buildings. After some years also the both from Padang and Hildesheim were included into the exchange and first delegations visited each other. From then on, there was a good exchange between the city administrations and finally they concluded a administrative arrangement between the two cities in the year 1988.

2) Main factors are the personal contacts between the people of both sides. Outside of our administration, “Mimi Admi Landri Schülter, Indonesian who married a German, is the motor of our cooperation. She has a good contact to both administrations, universities, and many people around. And for me personally, it is always a pleasure to work together with my colleagues in Padang, Mr. Erwin M, Sandra Septa, and their team, so we have also a friendship. Of course, continuity is because of the contract that we signed, but most of all by the personal contacts between the people.

2. What are the interest of Hildesheim City in this paradiplomacy?

In the beginning both administrations agreed to the following topics of interest :

-Technical, economical, social and cultural cooperation.

-Exchange of personnel and students.

-Exchange of information.

-Cultural exchange.

-Equipment.

3. Have the interest of the Hildesheim City been achieved in the Padang-Hildesheim sister city partnership during 34 years?

Yes, many exchanges of personel, students, information, equipment and culture took place during the past 34 years.

4. Why did the Hildesheim City Government decide to expand the sister city partnership of Padang-Hildesheim during 34 years?

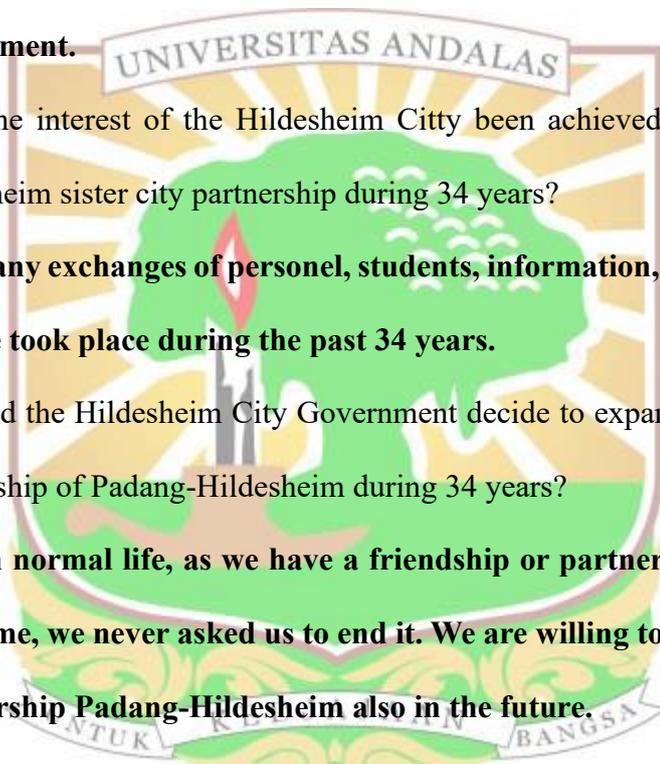
Like in normal life, as we have a friendship or partnership for such a long time, we never asked us to end it. We are willing to go on with our partnership Padang-Hildesheim also in the future.

5. What are the factors that have influenced the developing of the Padang-Hildesheim sister city partnership during 34 years?

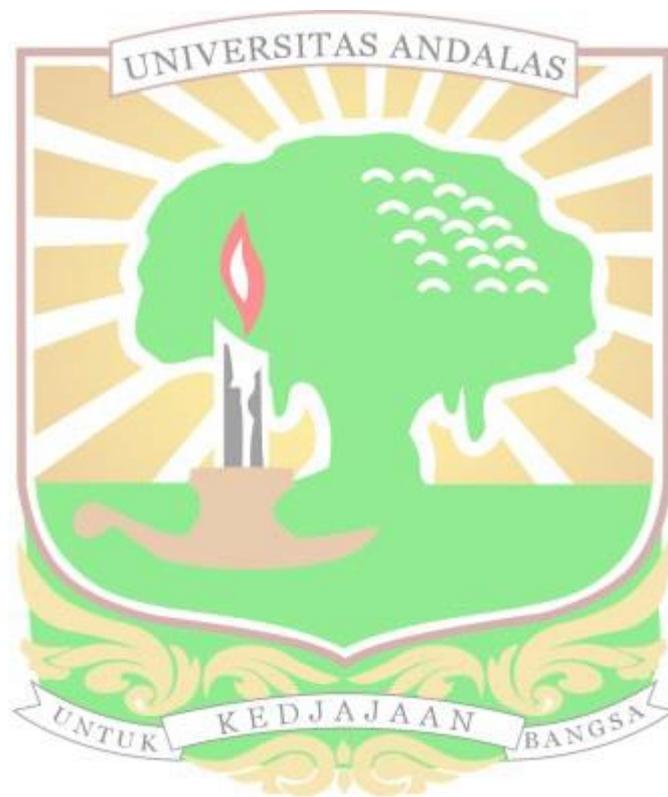
Main factors are the personal contacts between the people of both side.

Outside of our administration, “Mimi Admi Landri Schülter, Indonesian who married a German, is the motor of our cooperation.

She has a good contact to both administrations, universities, and many people around. And for me personally, it is always a pleasure to work



together with my colleagues in Padang, Mr. Erwin M, Sandra Septa, and their team, so we have also a friendship. Of course, continuity is because of the contract that we signed, but most of all by the personal contacts between the people.



Transkrip Wawancara 3

Pewawancara: Fella Fandwitania

Narasumber: Michell Rohman, Expert dari Pemerintah Federal Jerman untuk Kota Padang

Based on data I got from the “Declaration of Interest by Municipal Partnerships Wishing to Participate in the Program: Experts for Municipal Partnership Worldwide,” it is explained that the City Government in Germany will provide expert for cooperation between cities in the world, focusing on the Global South (developing or emerging countries).

Based on that explanation, I would like to ask few questions.

1. What are the factors that prompted Germany to establish the Experts for Municipal Partnership Worldwide program focusing on the Global South (developing or emerging countries)?
2. Is the program a form of program created by the Germany Government as an international obligation as a developed country?
3. May I request a detailed explanation from the City Government of Hildesheim regarding Germany’s international obligations as a developed country? If so, please explain it.

Answer :

I think the overarching frame for all your questions are the sustainable development goals SDGs and the Agenda 2030:

<https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals/?gclid=EAIaIQobChMIq->

[Hbw_KpgAMVFUNBAh3HrAJsEAAYAi-AAEgJ0v_D_BwEh](https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals/?gclid=EAIaIQobChMIq-Hbw_KpgAMVFUNBAh3HrAJsEAAYAi-AAEgJ0v_D_BwEh)

<https://sdgs.un.org/goals>

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals

the German Government developed a lot of projects and institutions like GIZ or KfW for achieving the SDGs, Goal number 17 is: Partnerships for the goals. You can find and read a lot about that e.g through the following links:

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (bmz.de)

<https://skew.engagement-global.de/home.html>

Search – SKEW (engagement-global.de)

[position-paper-sustainable-urban-development.pdf](#) (bmz.de)

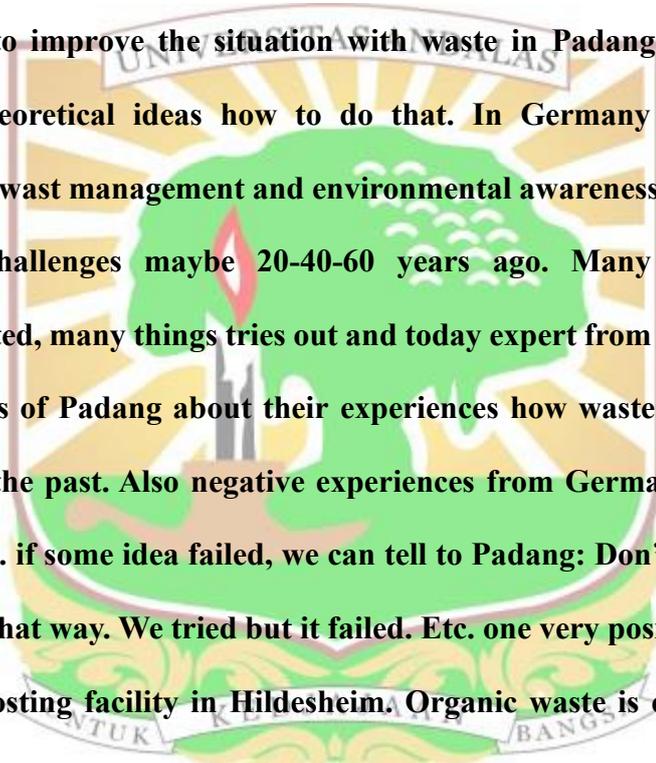
Creating sustainable cities (bmz.de)

Municipal cooperation is one part in our German development cooperation and for supporting the municipal cooperation between German municipalities and municipalities of the global south, institutions like SKEW were found and projects or funds like the GIZ Experts fund for municipal partnerships worldwide were set up:

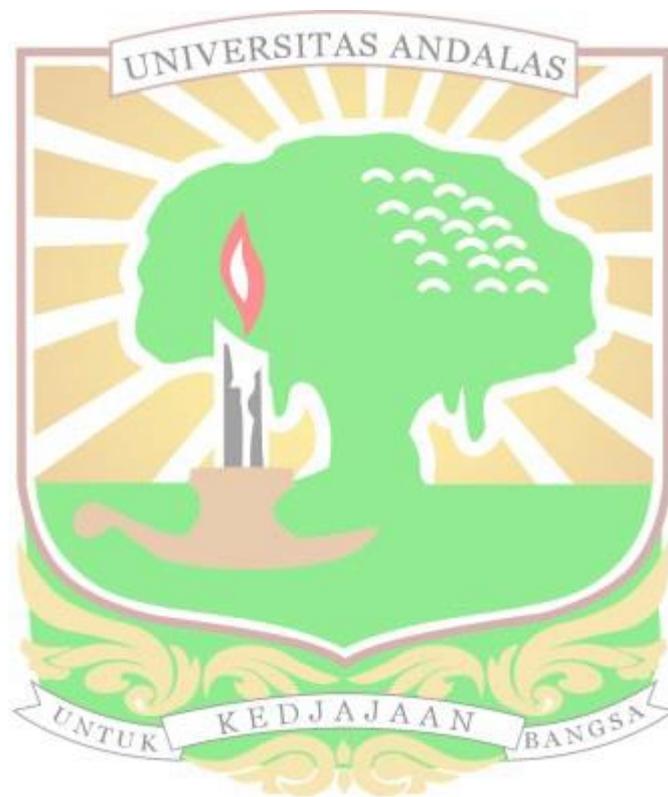
<https://skew.engagement-global.de/experts-for-partners.html>



our government, and I totally agree with that, have the opinion that our municipal experts that work in our German municipalities e.g. in the sector of waste or wastewater management, or maybe also urban planning, public transport sector etc. have a lot of practical experiences in solving municipal challenges which can be very helpful in municipalities of the global south. Let's take a small but very practical example; Padang City has big challenges regarding waste management. The responsible people try to find solutions to improve the situation with waste in Padang and they have certain theoretical ideas how to do that. In Germany the challenges regarding waste management and environmental awareness were similar to Padang challenges maybe 20-40-60 years ago. Many projects were implemented, many things tried out and today expert from Hildesheim can tell experts of Padang about their experiences how waste problems were solved in the past. Also negative experiences from Germany can be very helpful e.g. if some idea failed, we can tell to Padang: Don't try to solve it in this or that way. We tried but it failed. Etc. one very positive example in our composting facility in Hildesheim. Organic waste is collected in one central facility and about 40.000t of organic waste are composted there per year. We know that in Padang about 70% of the produced waste is organic, so this can also be a good idea to collect organic waste separately and compost it. There are more than 25 years of good practical experiences in Hildesheim and it is a very different story if you read a book or an article in the internet about composting or if you visit the facility and talk to the manager with 25 years of practical experiences. There are a lot of potential



in municipal cooperation, but we all the German municipalities and also the municipalities of the global south have to ask ourselves how to improve this cooperation and make it even better in the future to achieve the SDGs as soon as possible.



Transkrip Wawancara 4

Pewawancara: Fella Fandwitania

Narasumber: Yulcherlina, S.T, M.T, Penanggung Jawab Kerja Sama Universitas Bung Hatta, Padang dengan HAWK University Hildesheim.

1. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari buku yang berjudul 30 Tahun Kerjasama Sister City Padang-Hildesheim yang ditulis oleh Yulcherlina, Jose Rizal dan Ranti Iskasari dijelaskan bahwa salah satu latar belakang terbentuknya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim adalah adanya hubungan baik yang dijalin oleh kampus di Kota Padang yaitu Universitas Bung Hatta dan kampus di Hildesheim yaitu *HAWK University Hildesheim*. Apa saja motif awal terbentuknya hubungan baik kedua kampus tersebut?

Motif awal terbentuknya hubungan baik UBH dn HAWK adalah kepentingan para profesor dari HAWK dalam melakukan kerja praktek pada lokasi pasokan air dan drainase. Selain itu, adanya ketertarikan para profesor dari HAWK terhadap hasil arsitektur dari Teknik Sipil UBH.

2. Apa saja peran pihak Universitas Bung Hatta dalam pemebentukan paradiplomasi Padang-Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim?

Peran pihak UBH dalam pembentukan kerja sama ini adalah adanya mahasiswa UBH yang menjadi penghubung komunikasi dalam kerja sama ini. Mahasiswa UBH tersebut Bernama Mimi dan ia menikah dengan mahasiswa HAWK yang bernama Roland Schulter, sehingga

dengan adanya kontak pribadi mereka dengan universitas dan pihak lainnya membantu menghubungi pihak-pihak dalam kerja sama ini. Selain itu, Mimi dan Roland juga mengambil peran dalam mempresentasikan program-program dalam kerja sama *sister city* ini.

